

**NU DAN CIVIL SOCIETY
(STUDI TENTANG PANDANGAN TOKOH NU
TERHADAP PEMIKIRAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA)**

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NO. KLAS

NO. REG

: 0-2003/AF/029

Oleh

ASAL DARI :

**MOHAMMAD MUAT
NIM : EO.13.96.055**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT**

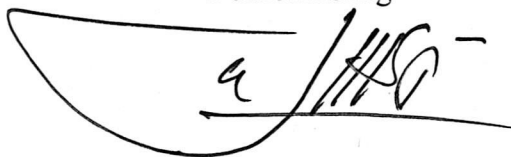
2003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Mohammad Muat** ini telah diperiksa dan disetujui
untuk di munaqosahkan.

Surabaya, Juli 2003

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping curve on the left and a more complex, stylized set of strokes on the right, including a vertical line and a horizontal line.

Drs. H. Kasno Sudaryanto M.Ag.

NIP. 150 224 884

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Mohammad Muat** ini telah dipertahankan
di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 19 Agustus 2003

MENGESAHKAN,

Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



DR. Abd. Khozin Afandi M.A
NIP. 150 190 692

Ketua

Drs. H. Kasno Sudaryanto M.Ag
NIP. 150 244 884

Sekretaris

Drs. Slamet Muliono M.Si
NIP. 150 275 955

Penguji I

Drs. Koekisno Ch.W. M.Ag
NIP. 150 259 374

Penguji II

Drs. Suhermanto Ja'far M.M
NIP. 150 274 382

ABSTRAKSI

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul "NU dan Civil Society (Studi tentang Pandangan Tokoh NU terhadap pemikiran Civil Society di Indonesia)", penelitian ini bertujuan untuk mencari kesesuaian yang logis dari masing-masing pemikiran (pihak yang mewakili)

Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan metode berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan mengkaji beragam data terkait, baik yang berasal dari sumber utama (*primary sources*), sumber data pendukung (*secondary sources*)

Dari hasil penelitian yang kami lakukan maka dapat kami simpulkan bahwa *civil society* menurut tokoh (tokoh muda) Nahdlatul Ulama, adalah sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Dalam perwujudannya, ia akan berbentuk asosiasi atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban atau kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) yang merupakan pengejawantahan dari kelembagaan *civil society*.

Hal tersebut menyiratkan adanya kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan di depan umum. Sebagaimana diungkapkan, bahwa substansi *civil society* dan masyarakat madani mempunyai titik kesamaan, meski hanya sebagian. Setidaknya ciri-ciri keduanya tidaklah jauh berbeda. Kelompok yang lebih cenderung memakai istilah masyarakat madani menekankan bahwa salah satu cirinya adalah adanya masyarakat yang patuh terhadap hukum, berkeadilan, dan ada hubungan (*check and balance*) antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*).

Dalam kaitannya dengan NU yang mana merupakan ormas yang diikuti oleh paling banyak masyarakat Indonesia, telah banyak membuat program pemberdayaan masyarakat walaupun terkadang cara-cara dalam merealisasi program kurang berjalan dengan baik walaupun begitu langkah-langkah dalam merealisasikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah, melalui pemberdayaan sumber daya manusia bidang ekonomi, budaya, politik mau tidak mau harus kita acungi jempol kita melihat bahwa dengan pengikut tidak kurang dari 40 juta jiwa mampu bersikap demikian pluralisme dalam menghadapi penguasa yang terkadang kurang simpati dengan apa yang dilakukan oleh NU sikap yang demikian adalah mencerminkan bahwa NU telah berjuang mewujudkan *civil society*.

| | |
|--|-------------|
| PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA | |
| No. KLAS | No. RFG : |
| | ASAL BUKU : |
| | TANGGAL : |

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| COVER DALAM..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| ABSTRAKSI..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 9 |
| 1. Nahdlatul Ulama | 9 |
| 2. Civil Society di Indonesia | 10 |
| C. Perumusan masalah | 11 |
| D. Tujuan dan Kegunaan penelitian..... | 11 |
| 1. Tujuan Penelitian | 12 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 12 |
| E. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Sumber Data | 12 |
| 2. Metode Pengumpulan Data..... | 14 |
| 3. Metode Analisis Data | 15 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| | |
| BAB II CIVIL SOCIETY DI INDONESIA..... | 18 |
| A. Perdebatan Konsep Civil Society..... | 18 |

| | |
|---|----|
| B. Ciri-ciri Civil Society | 28 |
| C. Perkembangan Civil Society di Indonesia..... | 30 |
| D. Hubungan Negara dan Masyarakat | 34 |

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III NU DAN PEMBENTUKAN CIVIL SOCIETY

| | |
|---|----|
| DI INDONESIA | 37 |
| A. Peranan NU dalam Mewujudkan Civil Society | 37 |
| B. Peluang NU dalam Mewujudkan Civil Society..... | 50 |
| C. Hambatan NU dalam Mewujudkan Civil Society | 53 |
| 1. Intern..... | 53 |
| 2. Ektern | 55 |

BAB IV NU DAN KELANJUTAN CIVIL SOCIETY

| | |
|--|----|
| DI INDONESIA..... | 56 |
| A. Pandangan Tokoh NU Tentang Kelanjutan Civil Society di Indonesia | 58 |
| 1. Pandangan KH. Hasyim Muzadi Mengenai Kelanjutan Gerakan Civil Society di Indonesia | 59 |
| 2. Pandangan KH. Ali Maschan Musa M.Si. Mengenai Hubungan Antara Khitah 26 dengan Civil Society | 67 |

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

| | |
|---------------------------------|----|
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 71 |
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran..... | 71 |
| C. Catatan Akhir..... | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Ada hubungan apa antara Nahdlatul Ulama (NU) dan *Civil society* di Indonesia? Mengapa NU selalu dikaitkan dengan perbincangan mutakhir tentang *Civil society* di Indonesia. Pertanyaan di atas menarik jika dikaitkan dengan realitas obyektif masing-masing entitas. NU adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial keagamaan, sedangkan *Civil society* adalah gerakan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian dalam masyarakat, masyarakat diupayakan untuk mampu mengurus dirinya “sendiri”.

Dalam diskursus gerakan Islam, baik dalam skala global maupun ke-Indonesia-an, NU mewakili kelompok Islam Tradisional. Suatu kelompok yang paham keagamaannya banyak didasarkan pada konstruksi (rancang bangun) pemikiran ulama-ulama atau mujtahid-mujtahid pada masa Islam klasik dan pertengahan. Konsekwensi lebih lanjut dari paradigma pemahaman Islam ini adalah, NU kemudian menjadikan warisan pemikiran Islam terdahulu, baik bidang fiqh, teologi, dan tasawuf sebagai rujukan yang dominan. Dalam fiqh mengikuti salah satu madzhab empat (Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali), tauhid adalah mengikuti apa

yang telah di ajarkan oleh Al-Asy'ari dan Al-Mathuridi, sedang dalam bertasyawuf mengikuti, Abu Hamid al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Bagdadi.

Doktrin Ke-NU-an sebagaimana dijelaskan di atas, ditegaskan oleh *Hudratussyayikh* Hasyim Asy'ari dalam salah satu pernyataannya yang dimuat dalam mukadimah *Qunun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama*, sebagai berikut:

“Wahai ulama, para ulama, dan para sahabat sekalian yang takut kepada Allah dari golongan ahlussunah wal jama'ah yaitu dari golongan yang menganut madzab yang empat, engkau orang-orang yang telah menuntut ilmu pengetahuan agama dari orang-orang yang hidup sebelum kalian dan begitupun juga seterusnya dengan tidak gegabah dalam memilih seorang guru dan dengan penuh ketelitian pula kalian memandang seorang guru dimana kalian menuntut ilmu pengetahuan”¹

Penegasan lebih lanjut tentang corak paham keagamaan NU dapat dijumpai dalam Anggaran Dasar organisasi ini (AD NU), yang berbunyi: “Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islam beraqidah Islam menurut paham Ahlulsunah Wal Jama'ah dan menganut salah satu Madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.”²

Kedua fakta di atas, doktrin keagamaan dan aktualisasi warga NU atas doktrin agamanya, dalam proses lebih lanjut dijadikan sebagai basis data oleh para ahli ketika melakukan studi terhadap NU. Salah satu ilmuwan yang melakukannya adalah Clifford Geertz. Studi Geertz, dengan

¹ Hasyim Asy'ari, *Muqodimah Qunun Asasi Nahdlatul Ulama* (Kudus: Menara, tt.), hal. 11.

² Hasil-hasil Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama, Penerbit Lajnah Ta'lif Wan Nasry PBNU, 1996, hal.91

pendekatan antropologis difokuskan untuk melihat watak atau karakter dan perilaku warga NU dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, baik menyangkut kehidupan beragama, budaya dan politik. Dari studinya, Geertz menyimpulkan bahwa masyarakat NU adalah masyarakat yang kolot yang tidak mau menerima perubahan termasuk menyerap konsep Civil society yang berasal dari Barat. Perilaku warga NU yang demikian ini, jika dibandingkan dengan perilaku kelompok-kelompok modern (Masyumi, Muhammadiyah, Serikat Islam dll) yang rasional, dan mengedepankan ikhtiar ketimbang paham *predeterminisme* (takdir), maka akan terjadi perbandingan yang berbalik seratus delapan puluh derajat.

Realitas Warga NU sebagaimana dikemukakan oleh Geert di atas, senyatanya bukanlah suatu kondisi yang bersifat final atau permanen, tetapi lebih merupakan suatu realitas pada masa tertentu dari bentangan panjang sejarah perjuangan NU dalam menapaki kehidupan organisasinya. "Kebenaran" kesimpulan Geert dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya, penilaiannya terhadap perilaku warga NU bisa saja dijadikan sebagai perspektif untuk melihat NU, tetapi harus segera dikaitkan dengan periode waktu tertentu.

Jika boleh dilakukan sebuah pengandaian, sangat mungkin Geert akan melakukan koreksi total atas kesimpulannya, ketika dia mengamati realitas mutakhir, terutama sejak NU dibawah pimpinan Abdurrahman

Wahid, yang menurut para ahli, dianggap sebagai pemimpin NU yang berhasil membawa NU keluar dari “kejumudan” dan menjadikannya sebagai organisasi yang sangat modern – yang bahkan dalam batas-batas tertentu, kemodernannya melampaui organisasi yang selama ini mengklaim diri sebagai yang paling modernis sekalipun.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur, geliat NU menjadi sangat progresif. NU tidak hanya berbicara menyangkut isu-isu keagamaan semata, tetapi lebih jauh dari itu, ia selalu berada di garda paling depan dalam memberikan respon atas persoalan-persoalan yang melanda bangsa ini. Gerakan NU telah melebar dan terus diperluas sehingga sampai pada gerakan HAM, pluralisme, perburuhan, hubungan antar agama, dan demokrasi. Kelompok-kelompok muda NU dengan basis intelektual yang sangat mapan muncul kepermukaan, dan mempelopori suatu rekonstruksi paham keagamaan yang lebih inklusif dan kontekstual sebagai upaya memecahkan lambannya pemikiran keagamaan pada satu sisi, dan menjawab persoalan Indonesia modern pada sisi yang lain. LKIS di Yogyakarta, eLsad di Surabaya adalah contoh-contoh dari geliat anak muda NU ini.

Dinamika sejarah NU – dari organisasi yang kolot dan kuno seperti kesimpulan Geert, menjadi sangat modern pada masa kini, dipotret secara sangat tepat oleh Mitsuo Nakamura, seorang Indonesianis asal Jepang. Bagi Nakamura, karakter tradisional NU tidaklah menjadi penghalang dalam

menghadapi perubahan-perubahan disekitarnya. Bahkan itu merupakan sistem yang cukup ideal di mana individu-individu bisa menyesuaikan diri mereka dan mampu menghadapi realitas sosial. Tradisionalisme NU dalam hal keagamaan dan pendidikan bukan berarti bahwa muatan yang dipelajari dan diajarkan juga bersifat tradisional, dalam arti repetisi yang buta terhadap hal-hal yang berbau masa lalu, tapi apa yang ditransmisikan bisa secara radikal. Nakamura menyatakan: "Saya yakin inilah satu alasan mengapa tradisionalisme NU tidak menghalangi, justru meningkatkan radikalisme organisasinya dan mengalahkan sikap radikal politiknya dalam merespon situasi-situasi tertentu, dari otoritarisme orde baru."³

Bentuk riil dari progresifitas dan inklusifitas dalam merespon persoalan-persoalan ke-Indonesia-an ditunjukkan dengan sikapnya yang mempolopori penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal bagi seluruh ormas dan orpol yang ada di Indonesia, namun dengan segera disertai sikap penolakan terhadap pemahaman tunggal yang dilakukan oleh pemerintah⁴, begitu pula dengan kembalinya NU ke khitah 1926. Menurut

³ Mitsuo Nakamura, "Tradisionalisme Radikal Catatan Muktamar Semarang 1979", dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan NU – Negara* (Yogyakarta : LKiS , 1997), hal. 73.

⁴ Douglas menulis alasan NU menolak penafsiran tunggal atas Pancasila, karena hal itu akan digunakan untuk memperkuat sistem politik orde baru, yang menurut Gus Dur tidak representatif, "*Pancasila serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia memuat ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Saya akan mempertahankan pancasila yang murni dengan jiwa raga saya terlepas dari kenyataan bahwa ia sering dikebiri atau dimanipulasi, baik oleh segelintir tentara maupun sekelompok umat Islam*, Lihat Douglas E Ramege "Pemahaman Abdurahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya", dalam Ellyasa KH. Darwis, *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 101.

Douglas, penerimaan NU terhadap azas tunggal “Pancasila” adalah keinginan jam’iyah NU. Langkah tersebut sebagai perwujudan dari semangat Civil society yang bebas dari fanatisme politik aliran, dimana semua unsur berhak untuk mengembangkan seluas-luasnya demi kemajuan bersama, juga untuk menghindari terjadinya bencana di era 1950-an dan 1960-an yang telah melibatkan konflik agama dan kesukuan.

Analisa kembalinya NU ke khittah 1926 juga dikemukakan oleh Mohammad AS Hikam. Menurutnya kembalinya NU ke khittah 1926 dilakukan pada momentum yang sangat tepat, yaitu ketika bangsa ini sedang gencar-gencarnya membicarakan penguatan gerakan civil society. Lebih jauh Hikam menyatakan, bahwa khittah 1926 mempunyai relevansi yang tinggi dengan proses penguatan Civil society di tengah masyarakat Indonesia. Terdapat tiga alasan yang mendasarinya, *pertama*, NU sudah tidak membatasi diri pada upaya pemecahan masalah yang menyangkut kepentingan warga Nahdliyin saja, tapi sudah diperluas mencakup kepentingan bangsa. *Kedua*, mengakui bahwa wilayah esensi bagi sebuah Civil society yang mandiri menjadi salah satu komitmen utama perjuangan. *Ketiga*, NU setelah kembali pada khittah 1926 berniat menitikberatkan gerakan pada level masyarakat dan ditujukan untuk memperkuat kemandirian dan kepercayaan diri.⁵

⁵ *Ibid.*, hal. 158.

Analisis Hikam di atas, secara implisit mengisyaratkan gerakan “*back to Khittah '26 NU*”, disamping ditujukan untuk melakukan penguatan pada gerakan pemberdayaan masyarakatnya yang karena konsentrasi politik yang terlalu besar, cenderung terabaikan, juga dimaksudkan agar NU dapat berperan serta – bahkan memprakarsai – proses penguatan Civil society yang merupakan prasyarat mutlak terciptanya demokratisasi yang menjadi proyek besar bangsa ini

Cita NU untuk terlibat secara langsung dalam penguatan Civil society pada gilirannya mengharuskan NU untuk melakukan reorientasi terhadap beberapa doktrin gerakannya, dan juga perubahan secara radikal atas watak dan perilaku warganya. Relasi Kyai (organ terpenting NU) dengan warganya yang selama ini cenderung bersifat *patron klien* dibingkai dalam kultur masyarakat feodal, adalah salah satu tradisi NU yang harus *direform*. Pendek kata, NU memerlukan suatu tafsir baru atas pilar-pilar organisasinya dan suatu *reading society* yang lebih komprehensif.

Dalam proses lebih lanjut, NU kemudian berhasil mewujudkan idealita di atas. NU Mutakhir adalah NU dengan gerakan kultural. Suatu gerakan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, entitas yang juga menjadi perhatian besar gerakan civil society. Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil; Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara, adalah contoh-contoh kecil buku-buku yang ditulis oleh

para pengamat NU kekinian, yang menggambarkan keinginan besar NU untuk menjadi lokomotif gerakan civil society.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam kaitan itulah, maka studi kritis dan terbuka yang berusaha melacak lebih dalam perubahan-perubahan internal yang dilakukan NU sehingga tercapai “titik balik peradaban”, meminjam istilah Fritschjof Capra menjadi sesuatu yang niscaya. Hal ini dimaksudkan agar keterlibatan NU dalam penguatan Civil society bisa dilacak oleh generasi berikutnya, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai basis analisa untuk melanjutkan gerakan di masa datang. Lebih jauh studi ini mencoba menelusuri dan mencermati apa yang pernah dicatat dalam muktamar-muktamar NU. Pemahaman dan penghayatan terhadap aqidah Islam Ahlussunah Wal Jama’ah yang melahirkan tanggung jawab dan komitmen kebangsaan Nahdlatul Ulama dan dinyatakan dalam perjuangan mewujudkan negara Republik Indonesia yang bercitakan *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur* berlandaskan pancasila dan UUD 1945.

Studi ini juga akan berusaha menguak relasi doktrin tradisional NU dengan dinamika sosial budaya, dan politik yang terwujud dalam realitas sejarah, terutama peran serta NU gerakan Civil society di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas konsep-konsep di atas dan membatasi lingkup penelitian ini, maka perlu diberikan gambaran tentang operasionalisasi konsep sebagai berikut :

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Adalah Organisasi Sosial Keagamaan yang berhaluan Ahlussunah Wal Jama'ah, organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M. atau pada tanggal 16 Rajab 1344 H yang disebabkan kegagalan utusan komite Hizaj untuk mengikuti muktamar Islam di Mekah, sekaligus bertemu dengan Raja Ibnu Saud penguasa daerah Makkah untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari para kiai di antaranya memohon agar penguasa Makah membebaskan penganut madzhab. Akhirnya para kiai yang berkumpul memutuskan untuk membentuk organisasi formal dari usul beberapa kiai akhirnya dipakailah nama **Nahdlatul Ulama** yang artinya “kebangkitan para ulama” seperti yang di usulkan KH. Mas Alwi. Dalam perkembangannya NU menjadi oragnisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan sudah mendirikan beberapa cabang di luar Indonesia.⁶

⁶ Deliar Noer; *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900 – 1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 243-244.

2. Civil society di Indonesia

Untuk membahas Civil society di Indonesia maka terlebih dahulu kita memahami apa yang di definisikan oleh Ahmad Baso dengan dua poros/basis dari munculnya konsep Civil Society, yakni basis kongnitif - epistemologis dan ideologis. Atau apa yang dikatakan oleh MAS. Hikam dengan basis institusional-sosiologis dan tataran visi. Basis kongnitif – epistemologis dari Civil society yang muncul dari daratan Eropa yang pada saat itu telah mengenal kelas-kelas sosial dalam masyarakat, dan agama mulai tersekularisasi mulai dari wewenang dan legitimasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat mulai berpindah dari tangan kaum agamawan ke kaum intelek dan hartawan, dalam arti nilai-nilai dan etika mulai universal. Sedang basis ideologi adalah Civil society itu sendiri.

Hal yang demikian menurut MAS Hikam juga terjadi pada masyarakat Indonesia yakni basis institusional-ideologis diantaranya lembaga intermediary antara negara dan masyarakat, yang mengedepankan rasionalitas, sekulerisasi, masyarakat yang otonom. Yang lebih lanjut akan ditata dan diarahkan sehingga bisa menjadi pengimbang dari kecenderungan-kecenderungan intervensionis negara, dan pada saat yang sama melahirkan daya kritis reflektif di dalam masyarakat. Kongkritnya Hikam mendefinisikan Civil society sebagai berikut :

“Wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain; kesukarelaan, kewaspadaan, dan kesewasembadaan, kemandirian tinggi, berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya”⁷

Dari pengertian Civil society di atas maka dapat kita asumsikan bahwa masyarakat setelah mengalami pendewasaan berpikir maka dimungkinkan masyarakat akan mampu mengurus dirinya sendiri, sehingga kemajuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Indonesia akan cepat terwujud.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas maka kita dapat merumuskan beberapa persoalan sebagai bahan penelitian :

1. Bagaimana konsep Civil society di Indonesia menurut Nahdlatul Ulama ?
2. Bagaimana peran Nahdlatul Ulama terhadap pembentukan Civil society di Indonesia ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui

1. Konsep tentang Civil society menurut Nahdlatul Ulama.

⁷ Mohammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil society* (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 3.

2. Sejauh mana peran Nahdlatul Ulama dalam pembentukan Civil society di Indonesia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Kegunaan Penelitian

1. Konsep tentang Civil society menurut Nahdlatul Ulama.
2. Diharapkan bisa mengungkap pemikiran kritis dari tokoh Nahdlatul Ulama yang bisa dijadikan bahan pembentukan organisasi sekaligus menjadi tambahan bahan bacaan tentang sosiologi agama
3. Sebagai pengetahuan yang bisa dikembangkan sebagai wacana diskusi lebih lanjut tentang Civil society yang sedang dikembangkan di Indonesia

E. Metode Penelitian

1. Sumber data

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang bersifat kualitatif dengan mengkaji beragam data terkait, baik yang berasal dari sumber utama (*primary sources*), sumber data pendukung (*scondary sources*) dan sumber data pendukung kedua (*scond scunder*).

Sumber data primer (data utama) adalah buku-buku atau tulisan yang secara langsung mengkaji hubungan antara NU dan gerakan civil society, baik yang ditulis oleh kalangan NU atau luar NU diantaranya adalah:

- Hasyim Muzadi, *Membangun NU Pasca Gus Dur, Dari Sunan Bonang Sampai Paman Sam.*
- Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama, Ditengah Agenda Persoalan Bangsa.*
- Ali Maschan Muesa, *Kia dan Politik, Dalam Wacana Civil society.*
- Ali Maschan Muesa, *NU, Agama, dan Wacana Demokrasi.*
- Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.*
- Kacong Marijan, *Quo Vadis NU, Setelah kembali Khittah 1926.*
- Ahmad Baso, *Civil society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran Civil society dalam Islam Indonesia.*

Sedangkan sumber data pendukung (sumber sekunder) adalah buku atau tulisan-tulisan yang mengkaji tentang NU dan Civil society secara terpisah. Buku-buku yang dimaksud adalah:

- Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society.*
- Muhammad AS. Hikam, *Islam, Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society, Erlangga, Jakarta, 1999.*
- Greg Fealy, Greg Barton, (ed) *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara, LKIS, Yogyakarta, 1997.*
- Ellyasa KH. Dharwis, *Gusdur NU dan Masyarakat Sipil, LKIS, Yogyakarta*

Selanjutnya sumber data pendukung kedua adalah bahan-bahan atau buku-buku lain yang berkaitan dengan pemikiran tentang NU dan Civil society atau yang berkaitan dengan proses studi ini termasuk tulisan-tulisan atau buku-buku yang memaparkan urgensi pembongkaran terhadap wacana civil di Indonesia.

2. Metode pengumpulan data

Data-data baik yang berasal dari sumber utama, sumber pendukung maupun sumber pendukung kedua, sepenuhnya diperoleh melalui penelaahan kepustakaan. Perolehannya melalui proses organizing dan seleksi, dimana data-data diorganisasi dan dikelompokkan secara selektif sesuai kategorisasi berdasarkan *content analysis* (analisis isi). Kemudian data tersebut dituliskan secara adanya dengan menggunakan metode deskripsi. Metode deskripsi yang dimaksud adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁸ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.II, 1988), hal. 63.

3. Metode analisis data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah menelusuri data-data primer yang masih bersifat universal yang diperoleh dari berbagai sumber yang mewadahi fakta atau informasi sejenis yang terkait dengan ke-NU-an dan gerakan civil society. Analisis data juga dimaksudkan untuk menjelaskan aspek-aspek yang terkait baik langsung atau tidak langsung antara Civil society dan pemahaman warga NU terhadapnya.

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah gabungan antara metode deduktif-induktif-komparatif. Metode deduktif adalah berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.⁹ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran tentang detail-detail gerakan NU dalam mewujudkan Civil society di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan metode induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰ Metode induktif ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang peran NU dalam mewujudkan Civil society di Indonesia. Sedangkan metode

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, Cet. XXIV, 1993), hal. 42.

¹⁰ *Ibid.*, h. 42.

komparatif dipakai untuk membandingkan pemikiran tokoh-tokoh NU tentang Civil society dan peranan NU dalam proses mewujudkannya dengan pemikiran ilmuan-ilmuan lain dari luar NU.

Adapun langkah-langkah yang Penulis tempuh dalam studi ini adalah:

1. Membaca buku-buku atau tulisan yang mengkaji secara langsung hubungan NU dan gerakan Civil society di Indonesia.
2. Mendeskripsikan pemikiran tentang hubungan NU dan gerakan Civil society di Indonesia.
3. Menganalisa pemikiran tentang hubungan NU dan gerakan Civil society di Indonesia.
4. Membuat kesimpulan-kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah menyusun skripsi ini, maka penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pada bab ini penulis menjelaskan, latar belakang pemilihan judul, definisi operasional perumusan masalah, tujuan dan kegunaan studi, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- Bab II : Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang perdebatan konsep Civil society , ciri-cirinya, dan pertumbuhannya di Indonesia serta hubungan antara masyarakat dengan negara.
- Bab III : Pada bab ini akan dilakukan analisa mengenai peranan NU dalam pembentukan Civil society di Indonesia.
- Bab IV : Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Civil society dalam pandangan beberapa tokoh NU, serta beberapa pemikiran tentang Civil society oleh tokoh NU tersebut.
- Bab V : Berisi kesimpulan, saran dan catatan akhir.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

CIVIL SOCIETY DI INDONESIA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Perdebatan Konsep Civil Society

Civil society sebagai sebuah konsep, berasal dari sebuah proses sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya bisa dirunut mulai Cicero bahkan ke belakang sampai Aristoteles. Civil society mulanya berkembang dari istilah *civilian goverment* (pemerintahan sipil) yang berasal dari buku *Civilian Goverment* karya John Locke, pada tahun 1960.¹ Buku tersebut mempunyai misi menghidupkan peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan.²

Dalam misi pembentukan pemerintahan sipil itu, John Locke membangun pemikiran otoritas umat untuk merealisasikan kemerdekaan dari kekuasaan elit yang memonopoli kekuasaan dan kekayaan. Menurutnya, semua itu bisa terealisasi melalui demokrasi parlementer.

¹ Pendapat ini lain dengan yang dikemukakan AS Hikam, yakni civil soceity sebagai sebuah konsep berasal dari sebuah proses sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya bisa dirunut mulai Cicero bahkan ke belakang sampai Aristoteles. Namun Cicerolah yang memulai menggunakan istilah societates civilis dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian civil society dianggap sama dengan negara (*the state*) Barulah paruh abad 18 terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan civil society dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda sesuai dengan pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat dari pencerahan (*enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi masalah duniawi. Lihat Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil soceity* (Jakarta: LP3ES, 1996) hal. 2.

² Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani, Isu-Isu Besar Politik Islam*, diterjemahkan Muhammad Abdul Ghofar (Bandung: Mizan, 1996) hal. 295.

Dalam hal ini keberadaan parlemen atau wakil rakyat adalah pengganti otoritas para raja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Disusul di Prancis pada tahun 1789, di mana John Jack Rousseau berbicara tentang pemikiran otoritas rakyat, dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia dan kekuasaan. Dalam hal ini ia satu tujuan dengan John Locke, yaitu mengajak manusia untuk ikut menentukan hari dan masa depannya, serta menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elite yang berkuasa demi kepentingan manusia.

Konsepsi Locke dan Rosseau tentang otoritas rakyat di atas lah yang akhirnya membuka jalan pemberontakan terhadap dominasi kekuasaan dan kesewenang-wenangan, yang akhirnya melahirkan revolusi Prancis 1789, sehingga permulaan abad XIX muncul pemikir-pemikir cemerlang yang mengobarkan pembentukan civil society yang menyadarkan banyak orang.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Akhirnya hal itu berakhir dengan pemikiran civil society yang menjadi simbol bagi masyarakat baru dengan berbagai kontrol yang bersifat fakultatif, yang mencakup banyak partai, kelompok, perkumpulan, himpunan, ikatan, dan lain sebagainya dari berbagai corak di luar struktur kenegaraan, yang mengekspresikan kehadiran rakyat dan mengakibatkan didirikannya berbagai macam lembaga swasta dalam masyarakat, untuk mengimbangi (melawan) lembaga kekuasaan.

³ *Ibid*, hal 295-296.

Dalam konteks perbincangan demokrasi di Indonesia, hadirnya konsep civil society menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat. Hal ini karena konsep civil society dapat dijadikan sebagai alternatif menuju proses demokratisasi di Indonesia, civil society dianggap sebagai bentuk ideal dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Maka tidak terlalu mengherankan, jika sambutan terhadap konsep ini begitu gegap gempita. Seminar, diskusi, dan kegiatan sejenisnya yang mengkaji civil society diselenggarakan dimana-mana.

Namun demikian, diskursus tentang civil society bukan berarti selesai. Para cendekiawan Indonesia berbeda pendapat tentang implementasi konsep ini di Indonesia. Hal ini, karena latar atau setting sosiologis antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Barat terutama Amerika – tempat civil society bersemai berbeda. Masyarakat Barat berlatar belakang liberalisme. Karena itu, sebagaimana para ahli mengajurkan agar dilakukan modifikasi-modifikasi terhadap konsep civil society ini, misalnya dengan konsep masyarakat madani. Sebuah masyarakat yang disandarkan pada sejarah Nabi Muhammad ketika mendirikan negara di Madinah yang dulu disebut (Yatsrib).

Tetapi pendapat yang "menyamakan" civil society dengan masyarakat madani inipun tidak serta-merta menyelesaikan perdebatan. Ada sebagian kelompok yang menolak pemikiran ini. Pada saat digelar seminar "*Islam dan Civil Society*" di Jakarta pada penghujung 1998, salah

seorang melontarkan pernyataan mengejutkan, "NU menerima masyarakat sipil tapi tidak masyarakat madani." Tentu saja pernyataan ini mendapat sambutan hangat dan mendapat sanggahan dari peserta yang lain. Di antara peserta yang memberikan tanggapan adalah Bakhtiar Effendy. Ia mengatakan bahwa tidak ada pemisah antara civil society dengan masyarakat madani. Masyarakat madani sama dengan civil society.⁴ Tidak lama kemudian, Bakhtiar memperjelas posisinya dalam wacana ini. Dia menulis, bahwa kata "masyarakat madani" dari sudut istilahnya mempunyai kedekatan makna dengan istilah civil society.

Dan, perdebatan semakin menghangat ketika Hikam bersilang pendapat dengan M. Dawam Rahardjo dan Nurcholis Madjid. M. Dawam Raharjo yang berlatar belakang Muhammadiyah, memahami civil society dengan menggunakan pendekatan sejarah Islam, lalu, yang tampak adalah upayanya mensejajarkan konsep ini dengan sebutan al-Quran "*baladatun thaayibatun wa rabbun ghafuur*" dan konsep al-Farabi tentang *al Madinah al Fadhilah*. Kemudian ia mengistilahkan dengan masyarakat utama (*khayr ummah*).

Masyarakat utama adalah masyarakat yang lebih tinggi tingkat perkembangannya, yaitu masyarakat yang memiliki sistem kelembagaan dan mekanisme yang menjamin berlakunya upaya-upaya masyarakat itu

⁴ Ahmad Baso, *Civil socety Versus Masyarakat Madani* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal.248.

sendiri untuk secara otonom mampu melaksanakan *fungsi amar ma'ruf nahi munkar* dan memelihara iman. Bahkan ia menekankan bahwa konsep *khayr ummah* ini dapat disebut sebagai teori kebudayaan yang menekankan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu kepastian moral, intelektual, dan artistik atau ragawi. Dengan kualitas-kualitas tersebut diharapkan masyarakat dengan faktor pengubah mampu mencapai tujuannya.⁵

Lebih jauh, Dawam mengatakan bahwa substansi civil society akhirnya bertemu dengan konsep masyarakat utama Muhammadiyah, maka yang diperkenalkan sebetulnya adalah sebuah konsep lama yang apolitis, yang kemudian dibungkus dengan istilah-istilah baru seperti civil society. Kesadaran Muhammadiyah sebagai civil society kian dikukuhkan beberapa tahun kemudian.⁶

Namun, konsep yang dikemukakan Dawam ini mendapat bantahan keras dari Muhammad AS. Hikam. Terlebih civil society dikaitkan dengan Islam di Indonesia. Dia menilai gagasan masyarakat madani yang dilontarkan oleh Dawam sudah mengarah pada islamisasi civil society, dengan konsep *khayr ummah* di atas.

Senada dengan pendapat Dawam di atas, adalah pendapat Nurcholis Madjid dengan konsep masyarakat madaninya, yang menurut

⁵ Dawam Raharjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, Cet. III, 1996), hal. 443-445.

⁶ Baso, *Civil Society*, hal. 96.

Hikam masih bersifat partikularistik. Hal ini menurut Hikam, karena Cak Nur menjadikan Islam sebagai standarisasi. Islam oleh Cak Nur dijadikan alternatif visi atas civil society. Padahal sebuah visi tidak harus bersifat alternatif. Namun Cak Nur mengatakan bahwa Islam harus menjadi landasan *value system* di Indonesia sebagaimana civil society di Amerika yang menjadikan Yahudi dan Kristen sebagai value system.

Pendapat Cak Nur di atas, didukung pula oleh Muh Hasyim, yang menganggap bahwa antara masyarakat madani dengan civil society tidak berbeda. Dia mengartikan civil society atau masyarakat madani adalah masyarakat yang santun, sopan, beradab di dalam menghadapi segala persoalan-persoalan, baik yang besar maupun yang kecil, yang rumit maupun yang mudah. Hal ini didasarkan pada kata madani yang berasal dari bahasa Arab dan mempunyai arti menjadi sopan, beradab, dalam istilah asingnya *to become civilized*. Kata "civil" dalam susunan civil society, mempunyai arti *polite well mannered*, sopan santun, dan berperilaku baik.

Selanjutnya Hasyim menggambarkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang memelihara perilaku beradab, sopan santun berbudaya tinggi, dalam pergaulan sehari-hari, dalam mencari kebenaran, dalam mengupayakan kesejahteraan atau dalam menerapkan hukum dan sanksi. Lebih jauh Hasyim menjelaskan bahwa jika dilihat dari istilah yang dipakai, konsep masyarakat madani secara historis tidak bisa

dilepaskan dari perjuangan Rasulullah SAW. yang berhasil membentuk masyarakat yang awalnya badawy, atau barbari menjadi masyarakat yang santun sopan dan berperadaban tinggi.⁷ Lagi-lagi Islam merupakan pijakan dan dijadikan alternatif visi bagi civil society.

Pendapat-pendapat yang mengusung konsep masyarakat madani dengan sandaran masyarakat Madinah masa Nabi sebagai ganti dari konsep civil society didasarkan pada pemikiran yang memandang Islam merupakan *dominant ideology*.⁸ Hal ini berbeda dengan Hikam dan Gus Dur yang menganggap Islam di Indonesia bersifat komplementer.

Perdebatan apakah civil society sama dengan masyarakat madani tidak akan diteruskan. Karena memang bukan itu tujuannya. Uraian tentang silang-sengketa antara mazhab civil society *versus* mazhab masyarakat madani di atas, hanya ingin menunjukkan betapa tema ini menjadi begitu penting dalam kaitan mempercepat proses demokratisasi di Indonesia.

Kembali ke bahasan awal. Terlepas dari perdebatan di atas, civil society sebagai sebuah konsep adiluhung yang berusaha melakukan pencerahan konseptual tentang hubungan rakyat dengan negara (*civil vis-a-vis state*) harus didefinisikan secara jelas.

⁷ Muhammad Hasyim, *Memuju Masyarakat Madani* (Surabaya: Cempaka, 1999), hal. 2-3.

⁸ Baso, *Civil Soceity*, hal 11.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah civil society sebagai "masyarakat warga" bahkan ada yang mengatakan dengan "masyarakat sipil".⁹ Kata-kata itu merupakan terjemahan leterlek atau verbatim yang dapat dibenarkan, akan tetapi kesalahan itu justru muncul dari pemahaman dari beberapa orang, ketika melihat civil society atau masyarakat madani merupakan lawan dari segala sesuatu yang berbau tentara atau militer. Kesalahpahaman ini kemungkinan didukung oleh pandangan bipolar yang selama ini muncul di antara kita, yaitu penghadapan yang tidak pas antara sipil dengan militer. Apa saja yang disebut dengan istilah sipil, pasti berlawanan dengan militer. Di samping itu dalam bahasa Indonesia, sipil diartikan warga penduduk atau rakyat (bukan militer).¹⁰

Kata civil disamping bermakna sebagai rakyat non militer, ia juga bisa berarti "peradaban". Peradaban sendiri – dengan segala variasinya – dalam diskursus civil society merupakan salah satu komponen penting, yang tidak hanya merujuk pada hal-hal yang secara khusus bersifat

⁹ *Ibid*, hal 249. Dalam penterjemahan civil socociety dengan arti "masyarakat sipil," Muhammad AS. Hikam sebagai tokoh yang bersikeras bahwa civil society secara substansi tidak sama dengan masyarakat madani, tidak terlalu keberatan dengan penterjemahan civil socociety dengan masyarakat sipil, tentu hanya dalam pengistilahan bahasa saja. Menurutnya persoalan civil socociety dengan masyarakat madani bukan hanya persoalan pengalih bahasaan, lebih dari itu, dalam hal cakupan, keduanya berbeda. Masyarakat madani cakupannya bersifat partikular terutama ketika dikaitkan dengan Islam. Yakni Islam itu merupakan alternatif dari visi atas civil socociety, padahal sebuah visi tidak harus bersifat alternatif. Tokoh seperti Hikam menyanggah pendapat itu, lebih jauh ia mengatakan bahwa Islam merupakan salah satu bagian dari sekian banyak value system, bukan sebagai alternatif visi.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, cet I, 2 001), hal. 1073.

politik, namun kehidupan kemasyarakatan secara lebih luas di situ terdapat dimensi sosial budaya, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Namun demikian, tidak cukup mendefinisikan konsep *civil society* dari perspektif kebahasaan semata, harus ada definisi baku yang dapat dijadikan acuan. Untuk keperluan ini, penulis akan meminjam definisi *civil society* yang diberikan oleh Hikam, yang menurut penulis merupakan cendekiawan Indonesia yang paling berjasa dalam mempopulerkan istilah tersebut.

Hikam memandang *civil society* sebagai ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.¹²

Lebih jauh Hikam menegaskan bahwa *civil society* berarti terjaminnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri dari masyarakat itu dalam kaitannya dengan kepentingan negara. Artinya, dengan kondisi yang demikian masyarakat mempunyai ruang gerak yang leluasa dalam mengekspresikan kepentingannya terhadap negara. Bahkan kontrol

¹¹ Baso, *Civil Society*, hal 249.

¹² Hikam, *Demokrasi* , hal.3.

terhadap negarapun sangat kuat. Dengan begitu, kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin menunjukkan keseimbangan. Antara negara dan masyarakat tidak terjadi tirani.

Menurut Hikam, konsep ideal di atas tidak akan terwujud tanpa didahului oleh proses pencerahan (*enlightenment*) yang akan mengantarkan pada tataran visi civil society. Untuk itu dibutuhkan kemampuan untuk menyerap nilai-nilai dari luar – yang mungkin untuk sementara masih dianggap di luar Islam – seperti rasionalitas, sekularisasi, dan nilai-nilai demokrasi. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan oleh pemikir-pemikir Islam terutama dalam konteks modern.¹³

Lebih lanjut Hikam menguraikan, bahwa secara institusional civil society bisa diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya, termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan, pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga, organisasi sukarela (termasuk partai politik), sampai pada organisasi-organisasi yang pada awalnya mungkin dibentuk oleh negara, namun melayani kepentingan masyarakat.¹⁴

¹³ Muhammad AS. Hikam, "Pengantar" dalam Baso, *Civil Society*, hal. 10.

¹⁴ Hikam, *Demokrasi*, hal 84.

Uraian Hikam di atas tidak dimaksudkan untuk menegaskan pemikiran-pemikiran cendekiawan lainnya sebagaimana dikemukakan di atas. Ia hanya dimaksudkan untuk memperjelas definisi civil society secara *genuine*. Hal ini, karena jika diamati secara seksama, senyatanya konsep civil society yang dipahami sangat beragam, pada tingkat substansinya banyak mempunyai kesamaan, antara lain sama-sama mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat bukan negara, pemberdayaan masyarakat dalam keberadaannya berhubungan dengan negara.

B. Ciri-Ciri Civil Society

Sebagai salah satu bentuk ideal masyarakat menuju demokrasi, bila civil society sudah terwujud, akan mempunyai indikasi-indikasi yang sesuai dengan definisi civil society. Berbedanya definisi di atas, secara otomatis indikasi yang dipakai dalam standarisasi terbentuknya civil society juga berbeda, tergantung dalam perspektif mana civil society itu ditafsiri atau dipahami.

Dalam perspektif MAS Hikam, civil society adalah sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, (*voluntary*), keswasembadaan, (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang

diikuti oleh warganya. Dalam perwujudannya, ia akan berbentuk asosiasi atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban atau kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) yang merupakan pengejawantah dari kelembagaan civil society.¹⁵ Hal ini menyiratkan adanya kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan di depan umum.

Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai kekuatan untuk memposisikan dirinya (kelompok) dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan negara merupakan wujud nyata dari adanya civil society. Negara tidak terlalu mengekang gerakan-gerakan pemberdayaan baik politik, ekonomi maupun budaya, atau justru malah mendukungnya selama masih dalam koridor hukum yang dilakukan oleh LSM-LSM, merupakan gejala terbentuknya civil society.

Eksisnya kelompok-kelompok studi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia, praktek-praktek pendampingan terhadap rakyat lemah dihadapan institusi negara, juga bukti konkrit yang mendukung terbentuknya civil society.

Sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa substansi civil society dan masyarakat madani mempunyai titik kesamaan, meski hanya sebagian. Setidaknya ciri-ciri keduanya tidaklah jauh berbeda. Kelompok yang lebih

¹⁵ *Ibid.*, hal 3.

cenderung memakai istilah masyarakat madani menekankan bahwa salah satu cirinya adalah adanya masyarakat yang patuh terhadap hukum, berkeadilan, dan ada hubungan *check and balance* antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*).¹⁶

C. Perkembangan Civil Society di Indonesia

Secara historis, kelembagaan civil society di Indonesia sudah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi dan menghasilkan pembentukan sosial baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Hal ini bisa dirunut secara historis semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, utamanya ketika kapitalisme merkantilis mulai dikenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Hasilnya adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elite pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke XX. Gejala ini menandai mulai bersemainya civil society di negeri ini.¹⁷

Pada abad ini, gerakan-gerakan organisasi melibatkan pekerja dan intelektual yang masih muda. Hal ini ditandai dengan munculnya

¹⁶ Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta dan Tantangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet II, tt.), hal. 3. "Pada intinya disepakati bahwa Islam mendorong penciptaan masyarakat madani. Nabi Muhammad sendiri bahkan telah mencontohkan secara aktual bagaimana perwujudan masyarakat madani itu."

¹⁷ Hikam, *Demokrasi*, hal 4.

kesadaran para buruh akan kebutuhan mereka untuk berorganisasi, dalam rangka menuju ke arah yang lebih baik. Sebenarnya para pekerja Eropalah yang memperkenalkan semangat perserikatan untuk pekerja Indonesia.

Serikat buruh pertama didirikan pada bulan Oktober 1905 oleh pekerja yang berasal dari Eropa di Perumka Bandung. Sebelumnya terbatas hanya untuk para pekerja Eropa, namun pada 1909 Perusahaan kereta api negara mengikutkan orang pribumi sebanyak 826 orang dari 1476 total anggota perserikatan itu.

Pembentukan perserikatan serupa berkembang di Jawa tengah dan tidak hanya pada perusahaan kereta api negara, namun berkembang pada perusahaan lainnya seperti jasa pos dan telekomunikasi, jurnalisme, dan pabrik-pabrik gula. Serikat-serikat ini secara efektif membawa suara-suara individual dan golongan orang-orang Eropa dan Indonesia dan mengadakan pemogokan spontan saat manajemen gagal memenuhi tuntutan mereka. Antara lain tahun 1906 sampai 1910. Perserikatan buruh pada masa ini membangun dasar bagi gerakan-gerakan buruh dan gerakan lainnya pada pasca kemerdekaan.¹⁸

¹⁸ Bob. S. Hadiwinata, "Dalam konteks Indonesia, kebangkitan civil society sesungguhnya dimulai sejak jaman penjajahan Belanda. Ketika itu perjuangan masyarakat melawan pemerintah kolonial melibatkan tiga kekuatan. Pertama, kaum petani radikal di pedesaan yang diwujudkan dalam serangkaian pemberontakan petani di Jawa dan Sumatera yang berlangsung sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kedua, kaum buruh militan yang terdiri dari pekerja pabrik gula, buruh perusahaan kereta api, operator trem, dan lain-lain. Melalui pelbagai serikat buruh yang ada mereka melakukan demonstrasi dan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan suasana kerja. Ketiga, kelompok pergerakan kaum muda yang terdiri dari para intelektual muda berpendidikan Barat yang membentuk kelompok-kelompok diskusi di kota-kota besar dan mulai mengekspresikan

Gerakan-gerakan masyarakat terus berkembang sampai era orde baru. Pembentukan organisasi masyarakat yang mempunyai visi pemberdayaan masyarakat terus berkembang. Bahkan pemerintah juga mendirikan organisasi-organisasi yang berorientasi pembangunan sosial seperti Korpri, LKMD, Dharma Wanita, Karang Taruna. Meski organisasi semacam ini hanya mendukung proyek-proyek pembangunan yang disponsori masyarakat, bukan mengupayakan kepentingan sosial dan tuntutan.

Sebagaimana yang dikemukakan sebelum sub bab ini, kuatnya negara pada masa orde baru mengakibatkan marginalisasi aktifitas-aktifitas sosial yang digerakkan oleh LSM atau organisasi massa lainnya, akhirnya masyarakat menyadari kebutuhan untuk membentuk organisasi dan menjalankan aktifitas yang memberi andil bagi pembentukan masyarakat. Jumlah LSM dan organisasi sukarela lainnya meningkat tajam pada 1980-an ini. Hal ini menandai semangat anti korporatisme pada tahun ini tumbuh dan berkembang. Aksi-aksi sosial yang mereka gerakkan secara langsung maupun tidak langsung memuat ide lebih eksplisit mencegah negara mendominasi dan melumpuhkan masyarakat.

Gerakan-gerakan sosial ini secara tidak langsung muncul sebagai manifestasi dari keputusan dan depresi, di mana perasaan ditindas dan

semangat nasionalisme dan kebebasan berpolitik. Melalui ketiga komponen ini masyarakat kita berupaya keras untuk menentang dominasi dan manipulasi yang dilakukan pemerintah kolonial."Kerusuhan dan Kebangkitan "Civil Society", dalam http://www.incis.or.id/artic_4.html.

dieksploitasi pada rakyat yang tidak punya pengaruh, telah menumbuhkan tuntutan akan keadilan sosial dan ruang yang lebih luas bagi manuver-manuver. Gerakan sosial ini merupakan indikasi dari berkembangnya civil society di Indonesia.

Di samping itu, ketika orde baru berkuasa, di mana orde baru memegang kendali negara dengan menggunakan sistem demokrasi liberal. Orde baru tampil dengan demokrasi yang berlanggam lebertarian di bidang politik dan berusaha untuk memenuhi kepuasan dibidang ekonomi. Namun langgam ini berjalan sementara waktu. Setelah orba mendapatkan legitimasi dari rakyat, proses selanjutnya cenderung mengarah pada negara organis¹⁹ yang kuat dan mampu mengatasi segala kekuatan yang ada dalam masyarakat.

D. Hubungan Negara dengan Masyarakat

Kata "negara" secara umum diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi teritorial suatu bangsa, sejak itu pula kata itu lazim ditafsirkan dalam berbagai arti. Negara lazim diidentifikasi

¹⁹ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara, Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, tt.), hal. 47. "Konsep negara organis dikemukakan oleh Alferd Stepan, dengan teorinya yang terkenal, "organis statis". Organ is berarti totalitas, suatu sistem lebih diutamakan daripada komponen-komponen yang merupakan bagiannya. Statis berarti tidak diam, dinamis. Negara organis berarti negara yang aktif dan kuat, negara memiliki kemauan dan kepentingan sendiri dan melakukan intervensi ke dalam kehidupan masyarakat."

dengan pemerintah, umpamanya apabila kata itu digunakan dalam pengertian kekuasaan negara, kemauan negara dan sebagainya.²⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Konsep state dan civil society berada pada teori negara sebagai kekuatan mandiri. Apabila posisi negara dihubungkan dengan posisi masyarakat, maka berdasarkan kriteria kemandirian negara, terdapat tiga kelompok teori tentang negara.

Pertama, teori negara sebagai alat (teori instrumentali). Menurut teori ini, negara adalah alat kekuatan yang menguasai negara. Teori ini dianut oleh kaum pluralisme dan Marxis klasik. Kaum pluralisme berpendapat bahwa kebijakan negara hanya merupakan interaksi kekuatan-kekuatan di masyarakat, sedangkan kaum Marxis klasik memandang negara sekedar alat bagi kelas yang dominan.

Kedua, teori struktural tentang negara. Negara dipandang memiliki kemandirian tetapi sifatnya relatif. Sebab, kemandirian itu lahir dari konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada. Jadi, berlangsung perubahan struktur, bukan negara itu sendiri yang membentuknya.

Ketiga, teori negara sebagai kekuatan mandiri. Negara sebagai subyek yang mempunyai kepentingan sendiri, yang berbeda dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada.²¹

²⁰ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (tt., Putra A Bardin, Cet. IX, 1999), hal. 92.

²¹ Thaba, *Islam*. hal. 45-46.

Pada dasarnya negara dibentuk oleh masyarakat, namun dalam kenyataannya negara kemudian memisahkan diri, mendominasi, mengontrol bahkan mengeksploitasi masyarakat.²² Konsep negara terdiri atas lembaga pemerintahan (*public institution*) dan aparat pemaksa (*coercion*) seperti militer, pengadilan, dan lembaga-lembaga hukum, serta lembaga-lembaga non pemerintah yang memproduksi ideologi dan mampu memperkuat hegemoni negara, misalnya keluarga, sekolah dan pers

Negara yang menggunakan korporatisme²³ sebagai strateginya dan rasionalisasi sebagai bentuk praksisnya disebut sebagai bentuk negara organis, di mana posisi masyarakat sangat lemah. Hegemony merupakan bahasa keseharian negara untuk intervensi dan kooptasinya. Dengan dalih demi kesejahteraan masyarakat, negara malah menciptakan kesempatan kontrol, masyarakat dalam posisinya berhadapan dengan negara sangat dikekang.

Dalam analisis demokrasi dengan teori "*state and civil society*", keduanya tidak dapat dipisahkan. State menjadi kuat karena melemahkan society, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian demokratisasi berjalan melalui pelemahan state. Seharusnya, state mengurangi intervensinya

²² *Ibid.*, hal 48. Sebagaimana teori yang dikemukakan Gramsci yang mendefinisikan negara secara luas. State yang dibentuk oleh society, namun dalam kenyataannya kemudian state mengontrol society, sekaligus mendominasinya.

²³ *Ibid.*, hal. 48, Korporatisme adalah sekumpulan kebijakan khusus dan pengaturan kelembagaan untuk membentuk perwakilan dari kepentingan-kepentingan. Bila pengaturan berjalan dengan baik, maka negaralah yang mengatur, bahkan menciptakan kelompok-kelompok kepentingan korporatis tersebut. Dan negara meminta imbalan dengan mengontrol kelompok-kelompok itu untuk dapat mencegah munculnya tuntutan-tuntutan..

dalam sektor publik dan membiarkan society menjadi mandiri, bebas bergerak. State berfungsi dalam pengawasan hukum, hankam, pelayanan administratif dan pelaksanaan keputusan publik. Dengan demikian secara teoritis, negara semasa orde baru bisa dikatakan sebagai negara organis.²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁴ *Ibid*, hal. 50-52.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

NU DAN PEMBENTUKAN CIVIL SOCIETY

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DI INDONESIA

A. Peranan NU dalam Mewujudkan Civil society

Civil society, istilah semakin hari semakin banyak menyentuh sendi-sendi kebangsaan di tanah air, NU sebagai salah satu lembaga sosial keagamaan yang di takdirkan sebagai penopang laju gerakan pemberdayaan masyarakat (Civil society) merupakan organisasi sosial keagamaan. Namun dilihat dari usaha NU, terutama dalam bidang sosial, substansi dari Civil society telah terkandung dalam pandangan dan tanggung jawab Nahdlatul Ulama terhadap khidupan kebangsaan dan kenegaraan, yakni mengusahakan terwujudnya keadilan sosial dan keadilan hukum di segala lapangan bagi seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan umat di dunia.¹

Civil society merupakan wacana kebangsaan yang didalamnya mengandung sebuah sikap, perilaku masyarakat, dalam hidup bernegara.

Secara definitif, Civil society dalam wacana kebangsaan di tanah air

¹ Di sebutkan dalam wawasan Nahdlatul Ulama tentang Pluralisme Bangsa, No.2, "Islam memberi jaminan dan toleransi dalam memelihara hubungan dengan meletakkan nilai-nilai Universal seperti prinsip keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal-hal tertentu. Dalam wawasan yang demikianlah Nahdlatul Ulama' meletakkan tata hubungan", Hasil-Hasil Muktamar ke 29 Nahdlatul Ulama (Jakarta: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 1996), hal 27.

masih dalam koridor perdebatan. kaum intelektual mempunyai persepsi yang berbeda tentang Civil society, tentu saja dengan berbagai argumennya masing-masing.

Seiring dengan berkembang masa wacana Civil society, banyak intelektual menyeragamkannya dengan istilah masyarakat madani. pendefinisian istilah Civil society juga ada yang disamakan dengan istilah Indonesia, masyarakat sipil² atau masyarakat warga dan lain sebagainya. Kebanyakan intelektual yang menggunakan istilah masyarakat madani³, terinspirasi dari sejarah pembentukan negara Madinah. Sebuah peradaban yang diciptakan oleh Rasulullah Saw.⁴ Rasulullah Saw. telah mencatat sejarah peradaban yang luar biasa. Dimasa sebelum Rasulullah dikenal dengan peradaban jahiliyah, di mana struktur sosial masyarakat ditentukan berdasar yang terkuat dialah yang berkuasa, sarat dengan pelanggaran hak asasi. Hukum pun berlaku sebagaimana dunia hewan di hutan belantara

² MAS Hikam, *Islam, Demikoratisasi dan Pemberdayaan Civil society* (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 80. "Tetapi bagi saya, selama belum ada suatu terma yang disepakati, istilah civil society akan selalu saya pergunakan agar posisi civil society itu jelas dahulu. Namun walaupun hendak di Indonesiakan, menurut saya, istilah Masyarakat Sipil lebih mendekati makna yang sebenarnya."

³ Nurhalis Majid dalam pengantar (2), bahwa tindakan pertama yang dilakukan oleh nabi untuk mewujudkan masyarakat madani itu ialah menetapkan suatu perjanjian yang disebut mitsaq al-madinah (Piagam Madinah), yang dikalangan sarjana barat dikenal dengan konstitusi madinah ini lah Dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Nurhalis Majid "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi Tantangan dan Kemungkinan" dalam Baso, *Civil Soceity Versus Masyarakat Madani* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal 22.

⁴ Di Madinah Muihammad adalah Komandan, yang diakui oleh kaum muslimin, baik kaum muslimin makkah (*muhajirin/imigran*), atau kaum muslimin madinah (*ansor/para penolong*), secara umum Muhammad juga penengah diantara semua kelompok sosial di Madinah, posisi ini dimantapkan dalam sebuah dokumen (yang kadang-kadang secara agak berlebihan disebut konstitusi Madinah. Lihat Marshall G.S. Hudgson, *The Venture of Islam*, terj. Mulyadhi Kertanegara (Jakarta: Paramadinah, buku 1, 1999), hal. 249.

yang terkuat adalah yang pemegang hukum. Sebuah peradaban yang jauh dari nilai-nilai hak asasi. Menguasai orang lain dengan cara fisik dijadikan pilihan hidup sehingga saling membunuh menjadi kebiasaan, secara otomatis berperang dijadikan sebuah pilihan, perang merupakan sebuah gaya interaksi masyarakat jahiliyah, sehingga tak jarang perempuan hidup di jaman ini. bayi perempuan yang baru lahirpun terkadang langsung dibunuh, karena dinilai perempuan tidak bisa perang, dan menjadi aib bagi keluarga dimata masyarakat.

Dengan hadirnya Rasulullah itu, banyak perubahan yang terjadi. Perjuangan beliau merubah peradaban jahiliyah menjadi peradaban yang sarat akan nilai-nilai kemanusiaan, religius, hak asasi, dijadikan patron oleh sejumlah pakar sebagai standarisasi masyarakat beradab. Muncullah istilah masyarakat madani, dengan pengertian yang diambil dari keadaan masa Rasulullah tersebut.

Istilah Civil society tidak bisa, diseragamkan dengan konsep masyarakat madani versi Dawam Raharjo atau Nurcholis Majid, --terlepas mereka mengatakan sama--. Civil society yang berangkat dari istilah barat⁵, diartikan sebagai ruang politik, di mana terjadi suatu wilayah

⁵ Masyarakat madani menurut kaum moderenis (Dawam Raharjo, Nurhalis Majid) adalah masyarakat yang bermoral, masyarakat yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dan kesetabilan masyarakat, Diskursus tentang masyarakat madani yang bergulir di Indonesia bertolak dari konsep civil society yang berkembang di Barat. Artinya istilah masyarakat madani memang tidak memiliki sejarah di sini, melainkan temuan kontemporer Prof, Naquib al-Attas, sebagai terjemah civil society *Jurnal Paramadinah*, Volume I, nomor 2, 1999, hal. 23-30.

sosial masyarakat yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Sementara di lain pihak juga mengartikan bahwa Civil society merupakan bentuk lawan dari masyarakat militer. ini karena civil dalam istilah Civil society diartikan sebagai non militer. Memang dalam istilah bahasa, civil bisa diartikan sebagai non militer, namun melihat keberangkatan istilah Civil society, artikulasi tersebut dirasa kurang pas. Sebab esensi Civil society bukanlah sebuah sikap yang dihadapkan dengan kelompok militer.⁶

Namun dalam kenyataannya Civil society merupakan jaminan terhadap perilaku, tindakan dan refleksi mandiri dari masyarakat itu dalam kaitannya dengan hubungannya dengan negara.⁷ Kondisi demikian memberikan kepada masyarakat ruang gerak yang leluasa dalam

⁶ "Pengertian civil society yang diterjemahkan dalam masyarakat sipil masih belum jelas, ketidakjelasan bentuk dan makna dari masyarakat sipil itu mengakibatkan kehadiran masyarakat sipil di tanah air dicurigai, ini wajar karena pengertian sipil sering diartikan secara asal "bukan militer" padahal yang dimaksud adalah masyarakat yang beradab yang dalam bahasa arab disebut Mujtama' Madani." Lihat Baso, *Civil society* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 306.

⁷ MAS Hikam, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokrasi di Indonesia*, "Baik paham civil society dan kewarganegaraan menekankan terpenuhinya jaminan-jaminan terhadap hak-hak dasar sebagai prasarat agar warga negara mampu melakukan tugasnya dalam kehidupan publik" MAS. Hikam, (Erlangga, Jakarta 1999), hal. 150.

mengekspresikan kepentingannya terhadap negara. Bahkan kontrol terhadap negarapun sangat kuat. Dengan begitu, kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin menunjukkan keseimbangan. Antara negara dan masyarakat, sehingga tidak terjadi tirani.

Secara otomatis, konsep ini tidak akan terwujud tanpa didahului oleh sebuah proses pencerahan (enlightenmen) yang akan mengantarkan pada tataran visi Civil society. Untuk itu dibutuhkan kemampuan untuk menyerap nilai-nilai dari luar -yang mungkin untuk sementara masih dianggap di luar Islam- seperti rasionalitas, sekularisasi, dan nilai-nilai demokrasi.

Dalam tataran empirisnya, bisa dikatakan Civil society telah terwujud, setidaknya ada beberapa indikasi yang mengarah ke sana. Adanya pengelompokan anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. Termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan, pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga, organisasi sukarela (termasuk partai politik), sampai pada organisasi-organisasi yang pada awalnya mungkin dibentuk oleh negara, namun melayani kepentingan masyarakat.⁸

⁸ Ciri utama dari civil society adalah kesewasembudayaan dan kesukarelaan. Maksudnya, asosiasi-asosiasi yang ada dalam rangka menyalurkan kepentingan bersama-sama untuk satu visi dan gagasan. Dan dengan kesewasembadaan mampu melakukan kiprah sendiri tanpa adanya ketergantungan serta keterbukaan; Lihat Hikam, *Islam* (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 85.

Sementara itu, Nahdlatul Ulama, bila dikaitkan dengan pengembangan Civil society, tentang peran dan eksistensinya, perlu melihat lebih jelas dulu prestasi-prestasi NU yang bila dihubungkan dengan konsep Civil society, apa ada relevansinya.

Tahun 1983 dan 1984 merupakan tahun keramat bagi NU, pasalnya tahun tersebut merupakan penentu gerakan NU setelah lebih kurang selama 30 tahun berkecimpung dalam dunia politik praktis. Dalam tahun tersebut NU melakukan reformasi total. Aspek normatif yang berupa upaya menggapai kemaslahatan umat, yang berpijak pada sosial keagamaan kembali dijadikan pijakan organisasi dalam melangkah.⁹

Selama berproses menjadi sebuah organisasi sosial keagamaan sebagaimana awal didirikannya NU sedikit demi sedikit mengarahkan langkahnya mengikuti perkembangan zaman, masuk dalam koridor politik praktis. Namun dalam perjalannya di dunia politik NU sering mendapatkan perlakuan yang tidak seimbang dengan apa yang disumbangkan oleh NU. Ketika bergabung dalam Masyumi¹⁰, NU seakan

⁹ "Muktamar Nu ke-27 merupakan titik balik dari kegiatan Nahdlatul Ulama selama ini, Gelanggang politik praktis segera ditinggalkan dan segera memasuki gelanggang baru sosial keagamaan yang sebelumnya relatif terbengkelai. Kacung Marijan, Quo Vadis, *Nahdlatul Ulama Setelah Kembali Khitah 1926* (Jakarta, Erlangga, 1992), hal. 147-148.

¹⁰ *Ibid*, hal.70. "Saya melihat bahwa, keluarnya NU dari Masyumi merupakan produk akumulatif dari perkembangan NU serta kekecewaan pada intelektual masyumi yang ingin melokalisasi para kiai NU pada persoalan-persoalan agama belaka.

dianaktirikan, meski telah menyumbangkan jumlah suara yang besar dalam pemilu. Begitu juga ketika bergabung dalam PPP.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keadaan ini ditambah dengan sikap tertutup dan kurang kordinasinya para elite NU, terutama tanfidziyah yang ketika itu dijabat oleh KH. Idham Chlolid. Para ulama banyak yang merasa dikecewakan oleh sikap Idham Chalid, terutama dalam kaitannya berhubungan dengan pemerintah. Idham sering kali memberikan sikap yang kurang disetujui oleh elemen NU lainnya, seperti ketika menerima konsep politik dari pemerintah, yaitu konsep penyederhanaan partai yang dikonsep oleh Ali Murtopo. Idham langsung menerima konsep itu tanpa bermusyawarah dengan anggota PBNU lainnya.¹²

Akhirnya NU mengambil langkah Khittah, kembali pada orientasi sosial keagamaan dan menyatakan diri tidak terikat dengan organisasi partai politik manapun. Dalam masa-masa ini muncul ungkapan "NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana".¹³

¹¹ "Pukulan telak terhadap NU ketika Naro secara sepihak mempersiapkan sebuah daftar calon untuk pemilu 1982, di mana anggota NU dikurangi secara drastis dan kebanyakan anggota NU yang vokal." Lihat Martin Van Brunaissen, *NU Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LkiS, cet. III, 1999), hal. 111.

¹² *Ibid*, hal. 101-102. "Pada 1973, sebagai langkah berikutnya dalam program penataan politik yang di rancang Ali Murtopo, NU terpaksa bergabung dengan tiga partai muslim lainnya menjadi partai persatuan pembangunan (PPP), partai politik lain yang berasas, nasionalis dan kristen digabung menjadi satu dalam partai Demokrasi Indonesia (PDI) jadi hanya dua partai disamping Golkar".

¹³ Seperti dijelaskan oleh KH. Yusuf Muhammad, bahwa "NU memang tidak lagi berafiliasi politik ke mana-mana, NU ada di mana-mana, tapi visinya kan harus tetap jelas. Kalau tidak jelas itu namanya mbambung (gelandangan), *Dinamika Nahdlatul Ulama Perjalanan Sosial*, Kompas dan Lakpesdam, 1999, hal. 10.

Aspek normatif yang berupa upaya menggapai kemaslahatan umat direalisasikan dengan berbagai langkah riil NU, meski terkadang terkesan unik dan kontroversi. Begitu pula ketika NU tampak jauh atau dekat dengan pusat-pusat kekuasaan, ketika itu pula pada dasarnya memiliki esensi yang sama, yakni demi kemaslahatan umat.

Dalam bidang sosial keagamaan, NU memberikan kontribusi penting dalam upayanya mewujudkan cita-citanya, terutama dalam pemahaman kebangsaan mengenai pluralisme. Suatu misal konsep amar ma'ruf nahi munkar, yang diperluas bidang garapannya, dengan merambah pada aspek-aspek kehidupan yang biasanya dianggap di luar kepentingan agama. Konsep ini lantas dimengerti dalam konteks kepentingan masyarakat luas bukan hanya umat Islam saja dan mencakup hal-hal yang bersifat keperluan dasar bagi manusia. Dalam hubungan ini sering disinggung perlunya mengembangkan prinsip umum pengaturan hidup yang lima, (jaminan dasar keselamatan jiwa, keluarga, sarta benda dan pekerjaan).¹⁴

Dari sini kerja riil NU sering dijumpai dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakannya, termasuk dialog agama-agama. Kegiatan semacam

¹⁴ Dalam materi Ahkam/Masail Diniyah Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama tentang Pandangan dan tanggung jawab Nahdlatul Ulama terhadap Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan., *Hasil-hasil Muktamar, ke-29 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta, Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 1996) hal. 19-32.

ini memberikan jaminan keberlangsungan hidup beragama, memberikan sikap mengakui dan menghormati terhadap pluralitas yang ada.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tidak hanya pluralitas dalam agama, namun dalam perbedaan pendapatpun NU sudah mengakui dan telah banyak memberikan contoh tentang adanya perbedaan pendapat itu. Sejak pertama, NU telah dihiasi oleh perbedaan pendapat secara internal maupun dengan pihak eksternal.

Yang paling terlihat jelas adalah perbedaan pemahaman masalah yang menyangkut masalah sosial keagamaan, ketika Gus Dur masih menjadi ketua umum PBNU. Pernah Gus Dur berbeda pendapat mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan dan kemasyarakatan dengan para Kiai Sepuh lainnya, terutama kontroversi yang dibuat Gus Dur ketika itu, beberapa persoalan dianggap tidak lanjut oleh para Kiai-kiai Nahdlatul Ulama.¹⁵ Tidak hanya itu, elite NU juga tidak jarang berbeda pendapat, mengenai asas tunggal Pancasila, juga mengenai urusan-urusan intern NU. hal demikian merupakan pelajaran bagi warga NU khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang paling terlihat adalah

¹⁵ KH. Imron Hamzah dan Choirul Anam (*peny*) Gusdur Diadili Kiai-kiai, Jelaskan pimpinan Dialog, "bahwa beberapa persoalan yang diajukan berkenaan dengan tindakan Abdurrahman Wahid adalah pertama, Abdurrahman Wahid, telah memperlakukan Islam sedemikian rupa sehingga seolah Islam hanya mengatur soal Akherat. Sebagai contoh, Abdurrahman Wahid menegaskan perlunya rukun tetangga disamping rukun iman, dan rukun Islam, kedua, Abdurrahman Wahid sering mengemukakan argumentasi atau penjelasan tentang sesuatu sikap yang bisa dikesankan mentolelir ajaran mu'tazilah tentang keadilan dan ajaran syiah mengenai imamah. Dia tampak telah menyelewengkan ajaran Aswaja sebagaimana yang dipahami secara umum, ketiga gagasan pribumisasi Islam yang dilontarkan agaknya diwakili oleh pengertian assalau'alaikum diganti dengan selamat pagi, keempat, banyak perilaku Abdurrahman Wahid selaku ketua PBNU yang dinilai tak bisa difahami oleh orang bawah, misalnya menjadi juri pada festival film nasional, memjabat ketua DKJ dan sebagainya", (Surabaya, Jawa Pos, 1989) cet 1 hal. 16.

ketika Gus Dur berbeda pendapat dengan KH. Yusuf Hasyim yang masih pamannya sendiri. Sampai-sampai, perbedaan itu juga terlihat dalam hal politik, karena KH. Yusuf Hasyim mendirikan partai politik sendiri ketika multi paradigma politik negeri ini menuju multi partai.

Dalam dimensi sosial, NU juga mengambil langkah merealisasikan cita-citanya yakni berlakunya ajaran-ajaran Islam, bukan berarti berlaku secara institusional, berdasarkan ahlussunnah wal jamaah. NU mengambil wilayah universalitas ajaran Islam, untuk dijadikan landasan dalam menghadapi tuntutan partikular masyarakat. NU mengambil pendekatan sosial budaya dengan cara memberikan solusi yang tidak mengharuskan Islam sebagai alternatif dalam kehidupan sosial, namun substansi dari nilai-nilai dan ajaran Islam secara komplementer mampu menjiwai aspek-aspek perilaku sosial dan mendorong terjadinya transformasi sosial sesuai dengan nilai kemanusiaan yang diakui secara universal.

Sehingga NU merealisasikan pendekatan sosial budaya tersebut dengan melakukan dialog terbuka dengan siapa saja yang memiliki keprihatinan terhadap permasalahan dasar yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini dan masa depan. Dengan demikian NU bukanlah organisasi yang hanya mementingkan diri sendiri atau umat Islam saja. Hal ini merupakan salah satu cikal bakal berdayanya masyarakat khususnya dalam bidang pluralisme.

Di tinjau dari kepentingan Civil society, di Indonesia, maka pendekatan NU tersebut menjadi relevan karena beberapa hal. Pertama, NU tidak lagi membatasi diri pada upaya-upaya pemecahan masalah yang menyangkut kepentingan warga nahdliyyin saja, tetapi diperluas hingga mencakup kepentingan bangsa. Kedua, NU mengakui bahwa wilayah esensi bagi sebuah Civil society yang mandiri kini menjadi salah satu komitmen utama perjuangannya. Ketiga, NU pasca khittah berniat menitikberatkan geraknya pada level masyarakat dan ditujukan untuk memperkuat kemandirian dan kepercayaan dirinya.¹⁶

Relevansi itu bukan hanya bisa dilihat secara sepihak dari intern NU sendiri, namun juga ketika berhadapan dengan negara. gerakan dan manuver NU yang langsung bersentuhan dengan rakyat bawah, menjadikan peran NU dalam ikut memberdayakan masyarakat, menuju kemaslahatan umat disadari atau tidak Organisasi ini telah ikut berpartisipasi dalam mmenciptakan peluang-pelung bagi terciptanya Civil society.

Sikap NU yang selalu kritis sekaligus loyal terlihat sejak jaman penjajahan sampai orde baru berkuasa, meski orde baru yang tak jarang menggunakan berbagai cara dalam kooptasi dan represinya memberikan kontrol, sehingga NU kurang mempunyai daya tawar tinggi dihadapan

¹⁶ Ellyasa KH. Dharwis, (ed.), *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 158.

negara, NU tetap saja pada prinsip organisasinya, dan bertahan dalam sistem yang telah digariskan.¹⁷

Strategi yang menitikberatkan pada pengembangan potensi masyarakat bawah, NU juga berkesempatan mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks politik ekonomi orde baru, sebagaimana yang telah dilakukan oleh LSM-LSM, NU juga berperan melalui program-program pengembangan ekonomi rakyat, seperti pendirian BPR, koperasi, pelatihan keterampilan, pendidikan yang dilaksanakan oleh badan otonom NU, atau lembaga-lembaga yang bernaung di bawah NU.¹⁸

Tidak terlepas pada persoalan pendidikan, NU dengan Lembaga Pendidikan Ma'arifnya telah banyak memberikan kontribusi konkrit bagi pemberdayaan masyarakat. Begitu juga dalam keorganisasian NU yang terdiri dari berbagai macam lembaga atau badan, di mana masing-masing mempunyai peran tanggung jawab berbeda. Antar lembaga atau badan

¹⁷ Sebagai contoh bahwa penerimaan NU terhadap asas tunggal Pancasila, seperti yang di jelaskan oleh Martin Van Brunessen, gagasan untuk menerima Pancasila sebagai sebuah simbol bangsa dan negara Indonesia, sementara pada saat yang sama menegaskan bahwa NU berpegang kepada penafsiran yang islami terhadap kelima sila Pancasila dan akan menjaga terhadap penyimpangan interpretasi dan penerapannya, Martin, *NU*; (Yogyakarta, LKIS, 1999) cet 2, hal. 136, juga diserukan oleh Rois Aam KH. Ali Maksum dalam rangkai peringatan HUT RI ke-37, yang isinya mengajak seluruh rakyat Indonesia terutama warga NU untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lihat H. Abdul Basit Adnan, *Kemelut di Tubuh NU* (Solo: Mayasri, 1982), hal. 105.

¹⁸ "Pada saat itu PBNU mendirikan BPR yang beroperasi atas nama NU, ada Bank SUMMA, walaupun kemudian terlikuidasi, sedang dalam pendidikan ada beberapa lembaga pendidikan milik NU diantaranya UNISMA, UNSURI, selain itu ada badan Otonom yang mengurus masalah pendidikan dasar dan menengah (Lembaga Ma'arif). Lihat Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 36-46.

otonom memacu merealisasikan program-program NU. Secara otomatis, pelajaran yang kita bisa ambil dari pembagian kelompok secara profesional ini adalah adanya pemberdayaan asosiasi-asosiasi yang ada dalam masyarakat. Dengan begitu makna dan substansi dari Civil society secara tidak langsung sudah tersentuh bahkan tergarapkan dengan sendirinya.¹⁹

B. Peluang NU dalam Mewujudkan Civil society

Masyarakat bawah, tradisional, yang merupakan basis massa NU, merupakan potensi besar bagi pengembangan NU. NU yang bersentuhan secara langsung dengan arus bawah sangat berkesempatan untuk memberdayakan mereka dengan kerja-kerja rintisan atau proyek-proyek pengembangan swadaya masyarakat. Baik dilakukan sendiri maupun kerja sama dengan pihak luar.

Rintisan-rintisan yang pernah dijalin dengan pihak luar sangat mendukung bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, keagamaan maupun bidang yang lain. Sikap terbuka bagi pihak manapun untuk berdialog dengan NU, terutama yang mempunyai kepentingan yang sama dalam hal perjuangan, merupakan

¹⁹ Sudirman Taba, *Restrukturisasi Kepengurusan Nahdlatul Ulama*, "Keempat badan Otonom itu ikut menambah jumlah lembaga yang telah ada sebelumnya yakni LP Ma'arif, L Dakwah, LKK. Perubahan orientasi Nahdlatul Ulama dari politik kepada orientasi Sisial (Dakwah, Pendidikan dan Kesejahteraan umat) diwujudkan secara nyata melalui lembaga-lembaga otonom, dalam *Geger di Republik NU*, (Jakarta, Kompas dan Lakpesdam, 1999) hal.253.

jalan bagi NU untuk semakin memantapkan langkahnya dalam mewujudkan cita-citanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Kebesaran NU tidak bisa lepas dari para kadernya yang saat ini duduk menjadi birokrat atau tokoh penting dalam lembaga-lembaga negara. Semakin banyaknya kader NU yang diberikan kepercayaan memimpin lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan, semakin menambah peluang NU dalam merujudkan Civil society. Peran mereka diharapkan mampu menjadi penggerak arus bawah sebagai sasaran gerakan pemberdayaan Civil society, tentunya melalui asosiasi-asosiasi yang mereka tempati. Misalnya, dengan adanya tokoh NU pada lembaga-lembaga pemerintah baik itu departemen atau yang lainnya, kita ambil contoh, meteri Agama RI, dipegang oleh KH. Said Agiel Al-Munawar, beliau termasuk pimpinan NU. Dengan tampilnya beliau iitu, membuka peluang bagi kuatnya sebuah asosiasi keagamaan dalam hubungannya dengan negara. Tidak seperti ketika orde baru, di mana Departemen Agama hanya menjadi legitimator negara dalam memaksakan kebijakannya dalam hal yang berkaitan dengan Agama. Kiranya peluang semacam ini patut dikembangkan oleh NU, karena relevansinya sangat erat dengan realisasi program menuju terciptanya kemaslahatan umat.

Dalam bidang politik peluang NU untuk memberdayakan masyarakat sangatlah terbuka lebar, terlebih dengan perubahan paradigma politik bangsa ini. NU yang telah menciptakan rumah sendiri

(mendirikan wadah aspirasi politik bagi warganya yang berupa PKB) semakin berpeluang memberdayakan masyarakat. Apalagi PKB telah mengikrarkan diri sebagai partai terbuka bahkan sekarang telah bergabung di dalam PDKB (Partai Daulat Kasih Bangsa), yang nota benenya partai yang didirikan oleh warga non-Islam, bukan hanya warga nahdliyyin yang diwadahi, namun seluruh lapisan masyarakat siap diterima PKB. Hal ini memberikan kesempatan besar bagi NU uuntuk merealisasikan pemahaman kebangsaannya kepada semua lapisan masyarakat, terutama tentang pluralisme.

Akibat perubahan sistem negara ini pula NU berkesempatan menciptakan ruang-ruang sosial, politik, ekonomi, budaya yang mengarah bagi terwujudnya Civil society yang menjadi ganjalan selama ini, diakui sebagai kelemahan NU adalah masalah ekonomi. Upaya-upaya NU dalam bidang ekonomi bukanlah sebuah upaya yang setengah-setengah. terbukti dengan kerja samanya dengan pihak luar NU semakin memantapkan langkahnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah ini patut dikembangkan, pada sektor-sektor lain, semisal pertanian. Sebagaimana telah dicanagkannya sebagai salah satu sektor andalan ekonomi bangsa. Ditambah basis massa NU juga berada di pedesaan yang nota bene adalah kaum petani. Dengan sdemakin memantapkan langkah-langkah yang sudah ada, NU bisa memberdayakan secara langsung kaum petani dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah ini terbukti dengan dikucurkannya

kredit untuk petani yang ditangani oleh LPNU walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kesalahan dan kekurangan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Selain itu, bangsa Indonesia yang saat-saat ini mempunyai banyak persoalan nasional yang sangat membutuhkan penyelesaian secara cepat, NU bisa tampil memberikan sumbangan dengan cara melibatkan diri secara langsung dalam pemecahan masalah yang bersumber dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan warga dan bangsanya. keterlibatan itu merupakan suatu keharusan yang tidak mungkin ditawar lagi.

C. Hambatan NU dalam Mewujudkan Civil society

1. Intern

Kalau di atas disinggung masalah basis masa NU, yakni arus bawah, hal ini juga merupakan hambatan bagi NU. Di mana masyarakat bahkan warga NU sendiri terkadang kurang bisa merespon apalagi mengikuti dan merealisasikan- ide-ide cemerlang yang terlontar dari para elitnya. Ide-ide yang datang dari Gus Dur, misalnya, terkadang malah membuat warga NU bingung, apa maunya dengan ide itu? Hal ini disebabkan masih rendahnya pola pikir kebanyakan warga NU, terutama yang berada di pedesaan dan jangkauan informasinya masih lamban.

Di samping itu, kebanyakan warga NU mempunyai tingkat fanatisme yang tinggi, yang tidak dibarengi dengan pola pikir yang maju. Fanatisme merupakan potensi besar sekaligus Hambatan tersendiri bagi NU. Bila fanatisme ini terarah, dalam arti implementasinya pada tempat yang sebenarnya, maka tidaklah menjadi persoalan, namun bila penempatan itu keliru, maka jawaban atas pertanyaan yang muncul akibat kekeliruan itu menjadi pekerjaan NU untuk menyelesaikannya.

Fanatisme yang keliru ini biasanya terimplikasi pada sikap yang kurang dipikir sebelumnya. Asalkan sesuatu yang berasal dari NU, maka pembelaan mati-matian akan dilakukan, bila sesuatu itu mendapat serangan, baik opini maupun serangan fisik. Yang pernah terjadi dan sempat disesalkan oleh beberapa pengamat adalah sikap brutal yang dilakukan warga NU ketika salah seorang tokohnya mendapat serangan opini buruk dari pihak lain, -terlepas serangan itu sebuah realitas atau tidak- namun pembelaan yang dilakukan telah memberikan dampak buruk bagi proses demokratisasi di Indonesia. Contoh kasus adalah Jawa Pos dengan Banser Surabaya.

Di samping itu, aksi dukung mendukung yang dilakukan warga NU juga merupakan persoalan yang harus dipikir ulang oleh NU, teruma dalam hal kepentingan politik. Aksi dukung mendukung kepentingan politik, bila sudah keterlaluhan bisa menghilangkan esensi

organisasi NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang selama ini berjuang untuk mewujudkan demokratisasi. Bila hal ini tidak diantisipasi, akan suatu saat secara esensi NU akan berubah menjadi organisasi politik, dan melupakan substansi organisasi sosial keagamaannya.

2. Ekstern

Rentannya pembalikan arah NU pada persoalan politik praktis tersebut, ditambah dengan setelah NU mendeklarasikan PKB, terlebih bila kader PKB bisa memimpin negara ini. NU yang bergerak pada sosial keagamaan, bisa berubah arah, berkonsentrasi pada kekuasaan yang telah dicapainya. Seperti pada ahir-ahir pemerintahan KH Abdurahman Wahid (Gusdur).

Adanya pengaruh dari organisasi lain, karena massa NU yang masih mempunyai fanatisme yang berlebihan, hal ini bisa mengakibatkan apapun langkah yang dilakukan oleh organisasi lain itu, dianggap sebagai persaingan, dan hal ini bisa mengakibatkan kecemburuan. Akhirnya menimbulkan penilaian negatif pada organisasi itu, meski langkahnya sangat bagus dan merupakan terobosan baru yang perlu dicontoh oleh NU sendiri.

BAB IV

NU DAN KELANJUTAN CIVIL SOCIETY

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DI INDONESIA

Sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama sudah memperlihatkan tanda-tanda yang kuat sebagai salah satu elemen civil society, walau dalam perkembangan selanjutnya mengalami pasang surut. Keterlibatan NU dalam politik praktis setelah proklamasi kemerdekaan membuat jam'iyah ini tercabut dari elemen civil society.

Namun setelah menyatakan kembali ke khitah 1926 tepatnya sejak muktamar Situbondo tahun 1984, NU kembali menunjukkan dirinya sebagai elemen yang cukup penting dalam memperjuangkan civil society. Kendati demikian ketika era reformasi tiba, banyak kalangan memandang bahwa kembalinya NU ke arena politik praktis di khawatirkan akan membuat organisasi ini keluar dari komunitas semula dalam memperjuangkan civil society, walaupun anggapan itu belum seratus persen betul. Jika kita melihat NU, kita jangan hanya melihat bahwa tokoh-tokoh elit NU bahyak yang aktif dalam sebuah partai seperti PKB. Kita harus bisa memandang Nahdlatul Ulama sebagai komponen bangsa Indonesia yang sedang berjuang demi kemakmuran rakyat ditengah krisis yang tak kunjung berakhir ini.

Kemudian yang perlu kita cermati apakah khittah 26 itu bisa menjadi pelita yang bisa menerangi organisasi ini ? mengingat khittah 26 dibuat (dilahirkan) dalam situasi politik di mana peran politik NU dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus-menerus mengalami marginalisasi oleh kekuatan-kekuatan "moderenis", di luar faktor tersebut, ada faktor yang sangat dominan saat itu yaitu kekuasaan (Negara) yang sangat kuat, yang secara terus-menerus melakukan hegemoni terhadap kehidupan intern partai lewat penyederhanaan system multi partai, jadi semua partai yang ada dipaksa untuk gabung (*fusi*) sehingga menjadi tiga partai (PPP, Golkar, PDI).

Kenyatannya setelah 32 tahun terbelenggu dengan system pemerintahan yang otoriternya (orde baru), NU mulai melakukan perubahan, yang terkait dengan system politik yang dulu dianggap tabu atau yang di tabukan oleh orde baru yaitu membentuk partai politik. dengan dilahirkannya partai kebangkitan bangsa (PKB)

Banyak orang yang khawatir dengan terlibatnya NU dalam politik praktis yang ditandai dengan dilahirkannya PKB setelah turunnya kekuasaan orde baru tahun 1998, Walaupun demikian keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam perebutan kekuasaan saat ini lewat Partai Kebangkitan Bangsa belum bisa dikatakan bahwa Nahdlatul Ulama telah melanggar khittah 1926. Ini bisa kita lihat dari pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama.

A. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Kelanjutan Civil Society

di Indonesia

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Khitah 1926 yang diharapkan bisa menjadi *jimat* untuk perjuangan pemberdayaan masyarakat (civil society) agaknya mendapatkan godaan yang besar di era reformasi ini, bagi kebanyakan orang khitah 1926 adalah pengalihan strategi perjuangan NU dari strategi yang kurang efektif pindah strategi yang lebih efektif.

Dalam bagian lain khitah merupakan konsensus ulama pada tahun 1984 yang tidak akan kehilangan relevansinya dengan zaman dan situasi apapun. Akan tetapi pada tahun 1998 komitmen khitah mengalami godaan yang begitu besar ini terjadi ketika perubahan arah politik di Indonesia setelah jatuhnya rejim orde baru ini terlihat jelas ketika PBNU membidani partai politik (PKB) walaupun partai yang didirikan oleh warga NU bukan hanya PKB ada PNU, PKU, Partai Suni, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id agaknya penyakit lama “politik praktis” mulai kambuh, padahal gerakan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh warga jam’iyah ini dalam kurun waktu 15 tahun telah mengarah pada terbentuknya pemberdayaan masyarakat sipil (civil society).¹

Bila kita tinjau dari pentingnya gerakan civil society di Indonesia gerakan yang dilakukan oleh NU dengan strategi khitah

¹ Qomar, Mujamil, “*NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam*”, (Bandung, Mizan, 2002) hal. 147-148.

1926-nya sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, dimana jam'iyah ini diikuti tidak kurang dari 40 juta penduduk Indonesia disebabkan beberapa hal, pertama NU tidak lagi hanya membatasi diri pada upaya pemecahan masalah-masalah yang menyangkut warga NU saja, melainkan sudah meluas pada kepentingan bangsa, kedua NU mengakui bahwa wilayah esensi dari sebuah gerakan civil society yang mandiri kini menjadi salah satu komitmen perjuangan NU, ketiga, nahdlatul ulama pasca khilafah tahun 1984 telah menitik beratkan perjuangan untuk memperkuat kemandirian dan kepercayaan diri masyarakat.²

Oleh karena itu peranan NU dalam pemberdayaan civil society dari waktu-kewaktu akan semakin relevan, maka kami mencoba menelusuri pendapat tokoh Nahdlatul Ulama baik yang sedang menduduki jabatan di PB NU atau di PW NU. Melalui buku-buku yang telah diterbitkan atau tulisan di majalah atau koran, serta mengikuti beberapa forum baik yang diselegarakan

1. Pandangan KH Hasyim Muzadi Mengenai Kelanjutan Gerakan Civil Society di Indonesia

Seperti diketahui bahwa Nahdlatul Ulama merupakan lembaga sosial keagamaan yang sejak awal tahun sembilan puluhan

² Maskur Yakub, *Epilog "Agenda Kedepan NU Pasca Gus Dur dan Gus Dur Pasca NU"*, dalam *Dinamika NU, Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasug (1994) ke Muktamar Kediri*, (Kompas

telah merintis gerakan pemberdayaan masyarakat atau yang sekarang populer dengan sebutan Civil Society, ini bisa kita lihat bahwa setelah NU kembali pada khittah 1926 yaitu pada muktamar Situbondo tahun 1984, Nahdlatul Ulama berusaha menemukan kembali pijakan yang kuat untuk reorientasi baik secara kelembagaan dan gerakan yaitu dengan berusaha untuk meninggalkan perebutan kekuasaan di dunia politik praktis, organisasi ini berusaha dengan melakukan perjuangan kultural bagi warga jam'iyah dan masyarakat Indonesia.³

Melalui lembaga-lembaga yang dimiliki Nahdlatul Ulama mencoba untuk melakukan pemberdayaan masyarakat baik di bidang Agama, Pendidikan, Sosial, Ekonomi. Sehingga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan civil society akan bisa terpenuhi dengan baik.

Maka dengan program pemberdayaan umat yang dilakukan oleh jam'iyah ini setelah kembali pada khittah 1926 diharapkan kiprah NU dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di semua lapisan. Tanpa meninggalkan karakter Nahdlatul Ulama yang kritis terhadap penguasa (pemerintah) ini tercermin dalam langkah yang diambil oleh PBNU yang tidak mentoleransi adanya

dan Lakpesdam-NU, 1999), hal. 201.

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik itu oleh negara, pejabat atau mantan pejabat dan masyarakat, itu bisa kita lihat ketika PBNU menanggapi diadilinya mantan presiden Suharto dan penanganan kasus Bulog yang melibatkan ketua DPR Akbar Tanjung, pengadilan pelanggaran HAM pasca jajak pendapat Timor Timur, serta ketidaksetujuannya dengan privatisasi pada beberapa BUMN yang potensial, yang selama ini memenuhi hajat hidup rakyat Indonesia seperti penjualan PT Semen Gresik.⁴

Lebih jauh, Menurut Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara pembentukan Civil Society di Indonesia dengan khittah 1926, karena khittah adalah yang menjadi gerak dan langkah NU dalam perjuangan pemberdayaan masyarakat, maka dari itu kembalinya Nahdlatul Ulama pada khittah 1926 adalah sebuah langkah strategis yang secara substansial menuju terbangunnya gerakan Civil Society baik dalam tubuh NU dan masyarakat pada umumnya, mengapa ? Karena lewat itu Nahdlatul Ulama bisa menyatakan secara tegas bahwa sudah tidak ikut campur dengan permainan politik praktis.⁵

³ Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama' di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, (Jakarta, Logos, 1999) hal. 105.

⁴ 8 Mei 2002, Jawa Pos.

⁵ Hasyim Muzadi, *Membangun NU Pasca Gus Dur*, Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 58.

Pada tahun 1998 setelah turunnya presiden Suharto, arah politik negara Indonesia berubah 180 derajat, yang dulunya kebebasan selalu dibelenggu oleh penguasa, maka pada tahun 1998 kebebasan yang luar biasa bebas terjadi dinegeri ini KH Hasyim melihat banyak sekali dorongan yang meminta Nahdlatul Ulama untuk menjadi pemain politik praktis, seperti dahulu sebelum muktamar Situbondo.

Mengapa Nahdlatul Ulama tidak mengubah dirinya menjadi sebuah partai politik tapi malah membentuk partai baru dalam hal ini PKB ? Dalam kaitannya dengan PKB partai yang dipunyai warga nahdlatul ulama itu bukan hanya PKB ada PKU, PNU dan sebagainya, perlu diingat hanya saja waktu itu atas desakan tokoh-tokoh (kiai sepuh) agar PBNU membidani PKB, walaupun telah membidani PKB, PBNU akan tetap mengambil jarak yang sama dengan partai yang lain. Berbekal khithah yang telah dirumuskan dalam Muktamar Situbondo maka Nahdlatul Ulama harus tetap menjadi organisasi sosial keagamaan yang netral politik karena dua alasan.

Pertama, sifat garapan Nahdlatul Ulama yang lintas sektoral apabila kita menceburkan diri pada gelanggang politik praktis di khawatirkan menyebabkan menyempitnya lahan garapan NU, bila kita memakai baju partai apakah NU mampu menghadapi

benturan yang timbul, sebab secara tidak langsung akan memaksa kita untuk duduk hanya pada satu perisai politik dan ini pernah terjadi ketika NU masih menjadi partai NU atau kita bergabung bersama Masyumi, PPP.

Kedua, orientasi politik praktis adalah bagaimana kita mendapatkan kekuasaan bukan kebenaran, meski tugas partai adalah menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili, jadi keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam berpolitik praktis bakal memunculkan sekat-sekat primordial dan benih-benih permusuhan. Kita bisa melihat buktinya pada akhir masa presiden Gus Dur.⁶

Namun tatkala membidani lahirnya sebuah organisasi politik (PKB) yang sudah tentu PKB akan ikut dalam perebutan kursi kekuasaan, banyak sekali pihak baik dalam tubuh NU (baik Syuriah dan Tandfidiyah) meragukan apakah Nahdlatul Ulama mampu menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun. Maka disini PBNU perlu murumuskan kembali langkah kedepan supaya Nahdlatul Ulama tidak dipandang sebagai lembaga yang partisan terhadap satu partai.

⁶ A. Hafidz Ma'some, *Reposisi Peranan Kultural NU* "Beberapa warga NU yang kecewa dengan jatuhnya Gus Dur di Jatim dan Jateng, bahkan dengan anarkis tega merusak kantor-kantor partai, lembaga pendidikan non-NU dan fasilitas umum lainnya", Jawa Pos, senin, 3 Juni 2002.

Menurut Hasyim Muzadi bahwa NU dalam hubungannya dengan organisasi politik harus netral, sehingga garis perjuangan untuk kepentingan masyarakat akan terpenuhi.

Apa yang telah dilakukan PBNU pasca Muktamar Kediri tahun 1999, yang sudah pasti Nahdlatul Ulama atau masyarakat NU punya wadah dalam menyalurkan aspirasi politik apakah itu melanggar khittah 1926 ? Sebentar kita jangan terlalu gegabah dalam membuat kesimpulan, ketika Nahdlatul Ulama membentuk PKB ada yang beranggapan seperti yang telah saya jelaskan bahwa Nahdlatul Ulama dianggap partisan ada pula yang melihat Nahdlatul Ulama akan menghadapi persoalan yang cukup serius karena apa setelah partai yang dibentuk memegang pemerintahan mau tidak mau maka Nahdlatul Ulama akan berdekatan dengan pemerintah itu sudah menjadi kenyataan betapa mati-matian kita membela Gus Dur waktu jadi presiden, maka berpijak dari pengalaman tersebut PBNU merasa perlu mengkritisi apa yang telah dilakukan oleh PBNU karena tugas Nahdlatul Ulama dengan khittahnya adalah bagaimana penguatan-penguatan terhadap masyarakat sipil (Civil Society).

Perlu dicatat bahwa apa yang telah dicapai Nahdlatul Ulama dengan khittahnya adalah bagaimana hubungan Nahdlatul Ulama dengan penguasa itu terbangun dalam garis horisontal bukan

vertikal seperti yang selama orde baru berkuasa. Sekarang mengapa Nahdlatul Ulama perlu membentuk sebuah partai dalam hal ini PKB karena dalam perjuangan Nahdlatul Ulama memerlukan sebuah perlindungan politik sebagai perisai, apakah itu salah, apakah lantas itu bisa disimpulkan bahwa NU telah melanggar khittah jawabnya tentu tidak, sebab secara prinsip khittah itu terbagai menjadi dua hal penting yang *pertama* yaitu bersifat permanen karena itu adalah nilai dan landasan perjuangan yang tidak akan pudar di makan jaman, yang *kedua* yaitu berkaitan dengan strategi bagaimana hubungan Nahdlatul Ulama dengan lembaga lain bisa partai dan LSM, karena langkah maka itu bisa berubah menyesuaikan perubahan jaman. Jadi telah jelas bahwa keterlabatan Nahdlatul Ulama dalam pembentukan partai politik yaitu PKB adalah hanya strategi perjuangan NU sekali lagi itu hanya strategi mengapa, karena itu tidak mungkit terlaksana pada masa orde baru.

Dalam mengikuti beberapa pertemuan baik yang diadakan oleh pihak Nahdlatul Ulama atau luar Nahdlatul Ulama dalam kami simpulkan bahwa begitu besar harapan dari KH Hasyim Muzadi dalam pengembangan gerakan Civil Society di Indonesia ini bisa kita lihat dari pandangan beliau mengenai pentingnya kerukunan umat beragama ini disampaikan disela-sela beliau membuka

seminar privatisasi BUMN yang diselenggarakan PP LPNU di hotel Shangrila Surabaya pada senin tanggal 7 Mei 2002, ketika beliau ditanya oleh salah seorang wartawan bahwa bagaimana tanggapan beliau mengenai kerusuhan yang melanda Maluku setelah ditangkapnya komandan laskar jihad yaitu ust Ja'far Umar Talib, beliau menjawab bahwa ini harus segera dicarikan jalan keluar yang baik dan tidak memihak pada salah satu kelompok yang selama ini bertikai, yaitu pemerintah harus segera membuat keputusan strategis mengenai persoalan yang sedang berlangsung di Maluku, ini penting terkait dengan keputusan pemerintah yang menetapkan darurat sipil serta rencana darurat militer di wilayah Maluku⁷, kemudian beliau melanjutkan bahwa dalam waktu dekat ini akan segera ke Maluku untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.⁸

Dari penjelasan ketua PBNU dalam dua bukunya tersebut terlihat betapa besar keinginan Nahdlatul Ulama sebagai lembaga sosial keagamaan terbesar di negeri ini untuk mewujudkan Civil Society sebagai gerakan moral di Indonesia tanpa mengkotak-kotak

⁷ Seperti dimuat oleh *Detik situs warta era Digital*, bahwa ketua umum PBNU Hasyim Muzadi menolak rencana pemerintah untuk menerapkan darurat Militer di Ambon, Rabu, 1 Mei 2002, [Http://www.Detik.com/warta_12](http://www.Detik.com/warta_12)

⁸ Jawa Pos, tanggal 8 Mei 2002.

diri, kita berasal dari golongan apa, agama kita apa jangan sampai kita mau diadu domba oleh pihak lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Masih mengamati apa yang dilakukan oleh ketua PB Nahdlatul Ulama, setelah pulang dari kunjungan ke Ambon beliau memberikan kesimpulan dari hasil kunjungan beliau ke Maluku, keterangan ini diberikan pada media massa di kantor PBNU, bahwa yang menjadi biang dari segala persoalan di Maluku adalah gerakan separatis yang menjadikan isu agama sebagai komoditi politiknya.⁹

2. Pandangan KH Ali Maschan Musa, M.Si., Mengenai Hubungan antara Khitah 1926 dengan Civil Society

Sekarang ini tampaknya untuk kesekian kali Nahdlatul Ulama harus menghadapi ujian yang tidak mudah, dikarenakan mulai tercerai berainya tali silaturahmi dan kekompakan yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id selama ini telah dibangun bersama, menurut ketua PWNU Jatim ibarat kapal yang semula tenang walaupun dihantam ombak yang besar sekarang ini menjadi oleng, walaupun begitu para awak kapal telah sadar bahwa bila dibiarkan maka kondisi kapal akan makin memburuk dan tidak menutup kemungkinan akan tenggelam.

⁹ Jawa Pos tanggal 19 April 2002, "Sesungguhnya sumber dari segala sumber kekacauan adalah gerakan separatis yang mengaduk-aduk Maluku, baik kelompok Islam maupun Kristen, dengan menggunakan isu agama."

Masih menurut Ali Maschan, bahwa yang menyebabkan retaknya tali silaturahmi di antara warga Nahdlatul Ulama adalah karena perbedaan aspirasi politik disamping juga dipicu adanya konflik internal warga Nahdlatul Ulama. Setelah 15 tahun kita hidup damai dengan berselumut khitah 1926.

Bila kita melihat lebih jauh mengenai pandangan ketua PWNU Jatim mengenai penafsiran khitah 1926 dan dalam hubungannya dengan gerakan Civil Society di Indonesia, pada dasarnya khitah 26 itu selalu mendasari setiap langkah yang dilakukan Nahdlatul Ulama, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya riak-riak kecil ketidakpuasan baik para pengurus PBNU sampai kebawah kita bisa lihat bagaimana reaksi para tokoh baik yang ada di Jakarta atau daerah menanggapi masalah lahirnya PKB.

Dalam sebuah pertemuan di kantor PWNU, penulis kembali menanyakan. Seberapa besar NU masih akan concern terhadap pemberdayaan masyarakat sipil atau yang lebih kita kenal dengan istilah civil society dengan komitmen khitah 1926 ?, bigini, bahwa pertama watak Civil Society itu terkait dengan kekuasaan, kemudian bagaimana penguatan-penguatan itu terjadi di masyarakat yang independen terhadap institusi pemerintah, kedua gerakan Civil Society adalah gerakan yang membela hak asasi manusia dan demokrasi. Ketiga bagaimana kelompok-kelompok tersebut punya

jaringan yang kuat dan solid, dengan demikian modal untuk penguatan masyarakat sipil menjadi tercukupi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian penulis memberikan tanggapan bahwa apakah itu terjadi pada tubuh NU ketika warga Nahdlatul Ulama mendirikan partai (PKB) dan Gus Dur sebagai akhirnya tampil sebagai presiden, apakah Nahdlatul Ulama masih bisa dianggap sebagai penggerak Civil Society mengingat ada semacam pembelaan yang dilakukan oleh warga jam'iyah terhadap penguasa? Pada saat itu sebetulnya NU tidak lagi menjadi kekuatan penopang Civil Society, secara temporary NU sewaktu-waktu tergantung pada pemerintah. Bila kita bicara politik di Indonesia sekali waktu NU tidak independen, khususnya pada pembentukan PKB sampai jatuhnya PKB yang ditandai dengan lengsernya Gus Dur, yang bisa dikatakan independen di sini adalah kelompok-kelompok yang berwatak Civil Society, katakan lembaga-lembaga atau LSM yang di dalamnya diisi oleh anak muda Nahdlatul Ulama di Surabaya adalah Elsad, di Yogyakarta ada Lkis, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga yang dimotori orang NU dan mereka itu cukup sulit untuk diintervensi. Bagaimana kalau intervensi itu dari Gus Dur? Sejauh ini saya tidak melihat Gus Dur melakukan itu, karena mereka punya konsep masing-masing yang cukup jelas, sekalipun

itu dilakukan oleh Gus Dur maka Gus Dur-lah yang akan diminta kembali ke khittah sebagaimana pemikiran semula.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian kami menanyakan kira-kira langkah apa yang diambil NU setelah melihat kinerja para kadernya yang kurang memuaskan baik yang di jajaran legislatif dan eksekutif ? NU dalam menilai seorang kader yang duduk di dewan itu sangat sulit mengapa karena ia berada di dewan atau jajaran pemerintahan bukan karena NU tapi lebih karena partai jadi kita tidak bisa berbuat banyak, paling kita cuma memberi saran yang terbaik bagi bangsa ini.

B. Kesimpulan dari pemikiran Dua Pimpinan Nahdlatul Ulama ✓

Dari penjelasan dua orang pimpinan NU yaitu KH Hasyim Muzadi bahwa khittah 26 itu yang mendasari langkah Nahdlatul Ulama dalam pembentukan Civil Society, serta khittah sebagai langkah strategis untuk memisahkan diri dari politik praktis setelah kurang lebih 15 tahun terlibat dalam politik praktis, demikian pula ketika menjelaskan masalah PKB bahwa warga NU tidak memihak salah satu partai, PBNU membentuk partai (PKB) hanya sebagai alat berjuang bagi kemakmuran rakyat jadi menurut Hasyim PKB adalah sebagai sarana untuk pemberdayaan Civil Society, karena dalam sembilan pedoman politik Nahdlatul Ulama

dijelaskan bahwa berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Kemudian Menurut KH Ali Maschan Musa, bahwa dalam memperjuangkan Civil Society tidak mungkin lepas dari benturan-benturan dengan kekuasaan, karena Civil Society sendiri merupakan sebuah politik yang memihak pada masyarakat, kemudian dalam kaitannya dengan partai yang didirikan oleh warga Nahdlatul Ulama itu adalah langkah strategis untuk pengutan Civil Society, namun NU terlena ketika kadernya berhasil menjadi orang nomer satu, itu berarti sekali waktu komitmen perjuangan Civil Society NU tidak madiri.

Dari beberapa kali bertemu dengan kedua tokoh NU tersebut dapat kami simpulkan maka begitu besar harapan rakyat Indonesia yang disandarkan pada organisasi NU maka masing-masing pihak harus menyadari bila terjadi kurang puas dengan apa yang dilakukan oleh digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id NU mulai dari PBNU, PWNU, sampai cabang-cabang bahkan sampai ranting-ranting yang tersebar mulai dari Aceh sampai Irian jaya. Dalam menyikapi masalah-masalah yang aktual kedua pimpinan NU itu melihat dampak yang akan terjadi apakah itu akan merugikan Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia jadi dalam mengambil tindakan kedua tokoh (KH Hasyim Muzadi dan KH Ali Maschan Musa) selalu mengedepankan kepentingan bangsa yang sedang dilanda banyak masalah mulai dari krisis sampai pecahnya NKRI.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *civil society* menurut Nahdlatul Ulama, adalah sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Dalam perwujudannya, ia akan berbentuk asosiasi atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban atau kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) yang merupakan pengejawantah dari kelembagaan *civil society*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hal tersebut menyiratkan adanya kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan di depan umum.

B. Saran

Mengingat NU merupakan organisasi massa terbesar di Indonesia, sekaligus mempunyai posisi di pemerintahan yang sangat strategis, maka

hambatan dan godaan NU akan semakin bertambah. Dari itu kiranya NU bisa bersikap hati-hati dengan posisinya. Kita telah melihat seandainya PKB menang maka bisa saja NU akan mengulang sejarah dengan Golkar.

Peluang-peluang yang sangat mungkin diciptakan hendaknya mendapat prioritas dalam pengembangan sumber daya manusia, hal ini mengingat posisi NU saat ini mempunyai harga tawar yang cukup tinggi.

Mempertahankan independensi organisasi dari intervensi, menghindari aksi dukung mendukung kekuatan politik justru akan menempatkan NU dalam tempat yang seharusnya, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Khittah 26.

C. Catatan Akhir

Sangat disadari oleh penulis, uraian penulis di atas bukanlah suatu hal yang istimewa, sebab kekurangan di dalamnya masih banyak. Akhirnya teguran koreksi dari pembaca senantiasa penulis harapkan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Buku-buku

Adnan, Abdul Basit, H, *Kemelut di Tubuh NU, Antara Kia dan Politisi*, Solo, Mayasri, 1982,

Asy'ari, Hasyim, *Muqodimah Qunun Asasi Nahdlatul Ulama*, Kudus, Menara, tt.

Azra. Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta dan Tantangan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cetakan ke II, 2000,

Baehaqi Imam (ed), *Kontroversi Aswajah, Aula Perdebatan dan reinterpretasi*, Yogyakarta, LKiS, cet 1, 2000,

Baso, Ahmad, *Civil socociety Versus Masyarakat Madani*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1999,

Brunaissen, Martin Van, *NU Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian wacana Baru*, Yogyakarta, LKiS, cet. 3, 1999,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Darwis, Ellyasa KH., *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, "Yogyakarta, LKiS, 1994,

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, cet 1, Jakarta, Balai Pustaka, 2001

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesamtren*, Jakarta, LP3ES, 1982.

Dinamika Nahdlatul Ulama "*Perjalanan Sosia, dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999)*" Jakarta, Kompas dan Lakpesdam, 1999,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Fealy, Greg, dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal : Persinggungan NU - Negara*, Yogyakarta, LKiS, 1997,
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta, Andi Offset, Cet. XXIV, 1993
- Hamzah, Imron dan Drs. Choirul Anam (peny) *Gusdur diadili Kiai-kiai*, Surabaya, Jawa Pos, 1989,
- Hasil-Hasil Mukhtar ke 29 Nahdlatul Ulama*, Jakarta, Lajnah Ta'rif Wan Nasyr PBNU, 1996,
- Hasyim, Muhammad, *Menuju Masyarakat Madani*, Surabaya, Cempaka 1999,
- Hikam, Mohammad AS, *Demokrasi dan Civil society*, LP3ES, Jakarta, Cetakan ke dua 1999,
- _____, *Islam Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta, Erlangga, 1999,
- _____, *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokrasi di Indonesia*, Erlangga, 1999,
- Hudgson, Marshall G.S, *The Venture of Islam* (terj) Mulyadyhi Kerta Negara, Jakarta, Paramadinah, , buku I, 1999
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani, Isu-isu Besar Politik Islam*, (terj) Bandung, Mizan, 1996,
- Isjwara, F. SH. *Pengantar Ilmu Politik*, Putra A. Bardin, Cet. IX, 1999
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis Nahdlatul Ulama Setelah kembali khitah 1926*, Jakarta, Erlangga, 1992,

Moesa, Ali Maschan, *Kiai dan Politik: dalam Wacana Civil Society*, Lepkiss Sunan Giri, Surabaya, 1999,

_____, *NU, Agama dan Demokrasi: Komitmen Awal Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, Pustaka Da'i Muda, Surabaya, 2002.

Mudjib, Abdul Drs. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-qowa'idul Fiqiyah)* Jakarta, Kalam Mulia, 1999.

Mujamil Qomar, "*NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam*" Bandung, Mizan, 2002,

Muzadi, Hasyim, *Membangun NU Pasca Gus Dur*, Jakarta, Grasindo, 1999,.

_____, *Nahdlatul Ulama di tengah Agenda Bangsa*, Jakarta, Logos, 1999,

Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900 – 1942*, Jakarta, LP3ES, 1996

Rahardjo M. Dawam, (Masyarakat Madani di Indonesia, Sebuah Telaah Awal) *Jurnal Pemikiran Islam, Paramadinah*, Volume I, nomor 2), Jakarta. Paramadinah, 1999,

_____, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung, Mizan, Cet. III, 1996.

Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara, Dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press. Jakarta. 1996.

Wahid, Marzuki (ed.) (et.al.), *Geger di Republik NU*, Jakarta, Kompas dan Lakpesdam, 1999.

II. Artikel-artikel

Detik Situs Warta Era Digital, "PBNU Tolak Rencana Parurat Militer di Ambon"

Detik.Com, Rabu, 1 Mei 2002., [Http://www.Detik.Com/warta_12](http://www.Detik.Com/warta_12)

Hadiwinata, Bob. S, "Kerusuhan dan Kebangkitan Civil Society" dalam

[Http://www.incis.or.id/artic_4.html](http://www.incis.or.id/artic_4.html)

Jawa Pos, 19 April 2002,

Jawa Pos, 3 Juni 2002.

Jawa Pos, 8 Mei 2002.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id